



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 217/PHPU.GUB-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALI KOTA KOTA
LHOKSEUMAWE TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
HALMAHERA SELATAN TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALI KOTA KOTA
PALOPO TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
BINTAN TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
MAHAKAM ULU TAHUN 2024**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

JUMAT, 10 JANUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Kota Lhokseumawe Tahun 2024
- Pemohon: Ismail, Azhar Mahmud

PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Rusihan Jafar, Muhtar Sumaila

PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Bahrain Kasuba, Umar Hi. Soleman

PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Kota Palopo Tahun 2024
- Pemohon: Farid Kasim, Nurhaenih

PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024
- Pemohon: Budi Prasetyo

PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024
- Pemohon: Novita Bulan, Artya Fathra Marthin

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Jumat, 10 Januari 2025, Pukul 08.01 – 10.12 WIB

**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

- 1) Mardian Wibowo
- 2) Yunita Rhamadani

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**

1. T. Fauzi Al Fansuri
2. Parulian Siregar

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 52/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Muh. Salman Darwis
2. Nasrullah

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 58/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Meidi Kurama
2. Bambang Joisangadji

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025

1. Wahyudi Kasrul
2. Irham

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 217/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Agung Ramadhan Saputra
2. Adiya Prama Rivaldi

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 224/PHPU.WAKO-XIII/2025:

1. Heru Widodo
2. Habloel Mawadi

G. Termohon:

1. Thabrid S. Thalib (KPU Kabupaten Halmahera Selatan)
2. Hary Zulficar (KPU Kota Palopo)
3. Pebry Pujiyanto (KPU Kabupaten Bintan)
4. Abdul Hakim (KPU Kabupaten Halmahera Selatan)
5. Munzir Daeng Badullah
6. Paulus Winarno Hendramukti

H. Kuasa Hukum Termohon:

1. Ridwan Hadi

2. Hendra Kasim
3. Faisal Hakim
4. Subhan
5. Istiarta Fajar Purnama
6. Raden Rio Utomo

I. Pihak Terkait Perkara Nomor 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025

1. Sayuti Abubakar

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025

1. Mahadir

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 52/PHPU.BUP-XIII/2025

1. AH. Wakil Kamal
2. Suwarjono Buturu

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 58/PHPU.BUP-XXIII/2025

1. Muh. Sahdam Husen
2. Guntoro

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 217/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Totok Prasetiyanto
2. Derek Loupati

I. Pihak Terkait Perkara Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. R. Ahmad Waluya Muharam
2. Frederick Melawen

N. Bawaslu:

1. Totok Hariyono (Bawaslu RI)
2. Fauzan
3. Khaerana (Bawaslu Kota Palopo)
4. Ardiansah Indra Panca Putra (Bawaslu Kota Palopo)
5. Sabrima Putra (Bawaslu Kabupaten Bintan)
6. Iskandar (Bawaslu Kabupaten Bintan)

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.01 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara 08, 52, 58, 217, 168, 224 PPHU Wali Kota, Bupati Tahun 2025, dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum dimulai, saya akan cek dulu ... kami akan cek dulu. Pemohon untuk Perkara 08, hadir? Terima kasih.

Pemohon untuk Perkara 52?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH. SALMAN DARWIS [00:52]

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:55]

Pemohon untuk Perkara 58?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [00:58]

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:00]

Pemohon untuk Perkara 217?

Pemohon untuk Perkara 168?

Pemohon untuk Perkara 224?

Ini pemain-pemain lama muncul lagi ini, yang sudah lama enggak. Pokoknya kalau ada pilkada ini rezeki untuk banyak. Ya, Pak Wakil Kamal, ya. Udah dicari kopian-kopian baru ini untuk apa ... Pihak Terkait ... maaf, Termohon untuk Perkara 08, Kota Lhokseumawe.

6. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN HADI [01:36]

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:38]

Hadir.
Termohon untuk Perkara 52, Kabupaten Halmahera Selatan?

8. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [01:44]

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:47]

Termohon untuk Perkara 5 ... 58, Halmahera Selatan?

10. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [01:50]

Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:51]

Dua-dua, ya? langsung pegang ya?

12. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [01:53]

Baik, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [01:54]

Ini berlipat-lipat ini.
Termohon untuk Perkara 217, Kabupaten Bintan.

14. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [02:01]

Hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [02:03]

Oke.
Termohon untuk Perkara 168, Kota Palopo.

16. KUASA HUKUM TERMOHON: SUBHAN [02:08]

Hadir, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [02:10]

Termohon untuk Perkara 224, Kabupaten Mahakam Ulu.

18. TERMOHON 224 [02:14]

Hadir, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [02:16]

Terima kasih.
Pihak Terkait untuk Perkara 08?

**20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MAHADIR [02:21]**

Hadir, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [02:23]

Hadir ya.
Pihak Terkait untuk Perkara 52?

**22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
52/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [02:27]**

Hadir, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [02:34]

Hadir.
Pihak Terkait untuk Perkara 58?

**24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
58/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [02:32]**

Hadir, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [02:34]

Wah ini jangan-jangan sudah ada sepakat ini. Di sini satu tempat,
satu tempat juga di sini.
Pihak Terkait untuk Perkara 217?

26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: TOTOK PRASETIYANTO [02:43]

Hadir, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [02:45]

Pihak Terkait untuk Perkara 168?
Ini yang baru masuk dari mana? Oh, silakan.
Pihak Terkait untuk 168, Kota Palopo? Belum.
Pihak Terkait untuk Perkara 224.

28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: R. AHMAD WALUYA MUHARAM [03:09]

Hadir, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [03:10]

Oke, terima kasih.
Bawaslu dari untuk Perkara 08, Lhokseumawe? Dalam perjalanan.
Untuk Perkara 52, 58, Halmahera Selatan? Belum. Sudah, ya?
Nah, itu. Sudah dikasih kesempatan bernafas sedikit dulu.
Bawaslu untuk Perkara 217, Kabupaten Bintan, hadir?
Untuk Perkara 168, Kota Palopo? Hadir. Untuk Kabupaten Mahakam Ulu, 224? Hadir. Pak Totok masih hadir, ya. Sudah sangat terkenal beliau di sini, kalau Hakim ini ada yang cuti kita minta Pak Totok jadi Hakim di sini karena sudah hafal persis ini.

Terima kasih. Ini agenda persidangan kita pagi ini adalah untuk mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan Pemohon. Jadi ini waktu pagi ini khusus untuk Pemohon, yang lain pada mendengar saja, tidak boleh protes dan segala macam. Tapi kalau ada yang mau bertanya nanti di ujung diberikan kesempatan, kalau ada yang perlu ditanyakan.

Pokok-Pokok Permohonan, masing-masing Permohonan itu diberi waktu maksimal 15 menit. Jadi maksimalnya 15 menit. Bagaimana caranya itu, urusan Pemohon jika perlu bacakan identitas langsung ke Petitum, gitu. Nah, begitu caranya. Yang pertama.

Yang kedua, yang disampaikan itu apa yang dituliskan dalam Permohonan yang diregistrasi. Apakah itu perbaikan Permohonan atau Permohonan awal yang tidak ada perbaikan Permohonannya. Jadi jangan yang lain, nanti akan kami tegur. Kenapa? Kalau disampaikan lain dari yang ditulis, nanti orang ini jadi ragu mau menjawab yang mana. Ini untuk kepastian hukum proses ini.

Nah yang ketiga, tidak ada lagi perbaikan karena semua pihak ... maaf, Pemohon sudah diberi waktu untuk memperbaiki Permohonan ini. Paham, ya?

Yang keempat, maksimalkan bukti di fase ini karena belum tahu Permohonan ini akan lanjut ke fase berikut. Begitu, Pak Wakil Kamal. Ini kalau lihat-lihat ini ragu juga ini Ustadz atau apa ini. Mungkin karena hari Jumat, nanti masjidnya dekat di sini, bisa jadi ta'mir di situ. Nah, itu.

Jadi ya, dimaksimalkan bukti-bukti baik, Pemohon, Termohon, Pihak Terkait maupun Bawaslu. Kenapa? Semua bukti itu akan kami periksa di tahap ini. Nah, nanti baru akan diputuskan, mana yang layak dilanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi jangan hanya berpikir, nanti kurang-kurang buktinya kalau ada pembuktian lanjutan. Nah, itu spekulasi namanya. Bisa dipahami, ya?

Kesempatan pertama kita berikan kepada Perkara atau Permohonan Nomor 08 Kota Lhokseumawe. Dipersilakan.

Sudah masuk? Oh, online, ya? Yang ... apa ... dari Lhokseumawe sudah bisa mendengar?

30. BAWASLU: FAUZAN [06:42]

Mendengar Majelis.

31. KETUA: SALDI ISRA [06:43]

Oke, terima kasih. Silakan mengikutinya.
Perkara 08, silakan.

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [06:49]

Terima kasih, Yang Mulia.
Kami akan bacakan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [06:55]

Ya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [06:56]

Yang selebihnya tidak kami bacakan.

35. KETUA: SALDI ISRA [06:57]

Itu dianggap dibacakan.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [06:59]

Dianggap telah dibacakan.

37. KETUA: SALDI ISRA [06:59]

Ya, silakan!

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [07:00]

Terima kasih, Yang Mulia.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01 dan seterusnya, tertanggal 3 Desember 2024, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Dr. Atang Irawan, S.H., M.H.[sic!] dan kawan-kawan, advokat dan pengacara yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum Bahu Partai NasDem, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap (...)

39. KETUA: SALDI ISRA [07:39]

Dianggap sudah diucapkan.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [07:39]

Telah kami bacakan.

41. KETUA: SALDI ISRA [07:40]

Ya.

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [07:42]

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, mohon dianggap telah kami bacakan.

43. KETUA: SALDI ISRA [07:46]

Ya.

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [07:46]

Kedudukan Hukum Pemohon juga dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

45. KETUA: SALDI ISRA [07:53]

Ini berapa selisihnya?

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [07:55]

Selisihnya (...)

47. KETUA: SALDI ISRA [07:59]

Dua ribu lima rat ... 9.53[sic!], ya?

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [08:01]

Seri ... 2.953.

49. KETUA: SALDI ISRA [08:03]

Oke. Jadi ini di luar ambang batas, ya?

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [08:05]

Betul, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA [08:06]

Tapi karena ada keja ... apa ... TSM.

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [08:10]

Pelanggaran-pelanggaran, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA [08:11]

Oke. Sekarang tolong diceritakan, mana saja pelanggarannya.

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [08:15]

Oke.

55. KETUA: SALDI ISRA [08:39]

Silakan.

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [08:42]

Langsung ke Pokok Permohonan, Pak?

57. KETUA: SALDI ISRA [08:43]

Ya, silakan.

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [08:46]

Pokok Permohonan.

Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut.

Tabel 1, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

59. KETUA: SALDI ISRA [08:57]

Oke.

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [08:57]

Bahwa berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 32.009 suara.

Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2, sebagai berikut.

Tabel 2 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

61. KETUA: SALDI ISRA [09:13]

Ya.

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [09:13]

Bahwa menurut Pemohon, hasil perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas, Pemohon menemukan pelanggaran terhadap proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, berupa adanya pemilih yang melakukan pencoblosan surat suara lebih dari satu kali di bilik suara dan dibiarkan oleh petugas KPPS.

Dan selanjutnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

63. KETUA: SALDI ISRA [09:37]

Itu TPS-TPS-nya, ya? Mulai halaman 10, ya?

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [09:40]

Betul, Yang Mulia.

65. KETUA: SALDI ISRA [09:41]

Halaman 10, ya.

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [09:41]

Tabel 3, ini ada 17 TPS di kecamatan ini, Yang Mulia.

67. KETUA: SALDI ISRA [09:47]

Oke.

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [09:47]

Di Muara 2.

69. KETUA: SALDI ISRA [09:49]

Jadi, ada Kecamatan Muara Dua. Jadi fokusnya Kecamatan Muara Dua, ya?

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [09:53]

Betul, Yang Mulia.

71. KETUA: SALDI ISRA [09:54]

Ini ada di desa atau Kelurahan Meunasah Blang, Meunasah Mee, Blang Crum, Cut Mamplam, Meunasah Manyang, ya?

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [10:04]

Betul, Yang Mulia.

73. KETUA: SALDI ISRA [10:05]

Oke, lanjut.

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [10:09]

Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Lhokseumawe Nomor 2 ... Nomor Urut 2, yang sebenarnya adalah 34.962 suara, dikurang 6.548 suara, sama dengan 28.414 suara.

Sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 32.000, dikurang 993 suara, sama dengan 31.016 suara.

Dengan demikian, perolehan suara Pemohon adalah lebih besar dari perolehan suara Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lhokseumawe Nomor Urut 2.

75. KETUA: SALDI ISRA [10:41]

Itu kenapa dikurangi 6.548, tu? Dari mana datangnya?

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [10:46]

Karena kami ... kami anggap dugaan itu kecurangan di ... di seluruh TPS itu, Yang Mulia.

77. KETUA: SALDI ISRA [10:51]

Di seluruh TPS itu, jadi semua suara yang Nomor 2?

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [10:55]

Dan ... dan suara dari ... dari nomor ... Nomor 3, (suara tidak terdengar jelas) kami. Kami kosongkan.

79. KETUA: SALDI ISRA [10:59]

Dikongkang?

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [11:02]

Ya.

81. KETUA: SALDI ISRA [11:02]

Lalu yang dapat ... apa ... oh, ini semuanya dikurangi, ya?

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [11:05]

Ya.

83. KETUA: SALDI ISRA [11:05]

Tidak dihitung, ya?

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [11:06]

Tidak dihitung, Yang Mulia.

85. KETUA: SALDI ISRA [11:07]

Oke. Oke, silakan, lanjut.

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [11:11]

Bahwa adapun bentuk-bentuk perbuatan pelanggaran di beberapa TPS di Kecamatan Muara Dua tersebut adalah sebagai berikut.

Bahwa di T (...)

87. KETUA: SALDI ISRA [11:18]

Oke. Tidak usah dibacakan, ya?

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [11:19]

Ya. Di TPS Meunasah Blang, TPS 1 sampai TPS 4 dianggap dibacakan, Yang Mulia. Begitu ju ... begitu ju (...)

89. KETUA: SALDI ISRA [11:25]

Ya, ya. Berarti ini nom ... halaman 10 sampai halaman (...)

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [11:34]

13, Yang Mulia.

91. KETUA: SALDI ISRA [11:36]

13?

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [11:36]

Karena beda ... beda desa.

93. KETUA: SALDI ISRA [11:38]

Oke.

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [11:40]

He eh. Bahwa di TPS 01, TPS 02, TPS 03, dan TPS 04 Desa Meunasah Mee dianggap dibacakan, Yang Mulia.

95. KETUA: SALDI ISRA [11:47]

Ya. Ini semua-semua desanya dianggap dibacakan, ya?

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [11:50]

Oke, ya. Terima kasih, Yang Mulia.

97. KETUA: SALDI ISRA [11:51]

Kalau begitu, ini diuraikan masing-masing.

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [11:55]

Ya.

99. KETUA: SALDI ISRA [11:56]

Oke. Kalau begitu ini lanjut ke no ... halaman 23, poin 12. Atau ada hal lain yang mau disele ... dijelaskan terlebih dahulu?

100. KUASA HUKUM PEMOHON 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [12:08]

Benar, Yang Mulia.

101. KETUA: SALDI ISRA [12:10]

Silakan!

102. KUASA HUKUM PEMOHON 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [12:11]

Poin 12, ini. Poin 12.

103. KETUA: SALDI ISRA [12:11]

Ya.

104. KUASA HUKUM PEMOHON 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [12:13]

Kami baca dulu, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah terjadi pelanggaran dalam pemungutan dan penghitungan surat suara di beberapa TPS di Kecamatan Muara Dua sebagaimana diuraikan di atas dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lhokseumawe Tahun 2024, yaitu tidak sesuai prosedur dan tata cara sebagaimana peraturan perundang-undangan dilakukan oleh Termohon. Sehingga perolehan suara Calon Nomor Urut 3, di sini, Yang Mulia.

105. KETUA: SALDI ISRA [12:38]

Ya.

106. KUASA HUKUM PEMOHON 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [12:40]

Calon nomor urut 3 di ... mohon di-typo ... Calon Nomor Urut 2 yang benar.

107. KETUA: SALDI ISRA [12:43]

Oke. Ndak ada lagi perbaikan-perbaikan, Pak, ya?

108. KUASA HUKUM PEMOHON 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [12:45]

Ada. 1, Pak.

109. KETUA: SALDI ISRA [12:47]

Oh. Pokoknya (...)

110. KUASA HUKUM PEMOHON 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [12:47]

Di (...)

111. KETUA: SALDI ISRA [12:47]

Tidak boleh, Pak. Nah, itu kuncinya. Bapak lanjut saja.

**112. KUASA HUKUM PEMOHON 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
PARULIAN SIREGAR [12:51]**

He eh.

113. KETUA: SALDI ISRA [12:51]

Oke.

**114. KUASA HUKUM PEMOHON 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
PARULIAN SIREGAR [12:55]**

Langsung (...)

115. KETUA: SALDI ISRA [12:55]

Terus.

**116. KUASA HUKUM PEMOHON 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
PARULIAN SIREGAR [12:57]**

Mungkin langsung ke Petikum, Yang Mulia.

117. KETUA: SALDI ISRA [12:58]

Ya.

**118. KUASA HUKUM PEMOHON 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
PARULIAN SIREGAR [13:00]**

Ya.

Petikum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 700 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Lhokseumawe Tahun 2024 tertanggal 2 Desember 2024[sic!] yang diumumkan pada hari Senin,

Tanggal 2 Desember 2024, sepanjang mengenai perolehan suara di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 Desa Meunasah Blang. TPS 01, TPS 02, TPS 03, dan TPS 04 Desa Meunasah Mee. TPS 01, TPS 02, TPS 03, dan TPS 04 Desa Blang Crum. TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Desa Cut Mamplam. Dan TPS 01 dan TPS 02, Desa Meunasah Manyang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe.

3. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe untuk melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 Desa Meunasah Blang. TPS 01, TPS 02, TPS 03, dan TPS 04 Desa Meunasah Mee. TPS 01, TPS 02, TPS 03, dan TPS 04 Desa Blang Crum. TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Desa Cut Mamplam. Dan TPS 01 dan TPS 02 Desa Meunasah Manyang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe.
4. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami Kuasa Hukum Dr. Atang Irawan S.H., M.H., dan kawan-kawan ditandatangani.

119. KETUA: SALDI ISRA [15:09]

Terima kasih.

Ada yang mau didalami, Yang Mulia, Pak Arsul? Silakan.

120. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [15:16]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel.

Saudara Pemohon, ya. Ini terkait dengan 17 TP (...)

121. KUASA HUKUM PEMOHON 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [15:25]

TPS.

122. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [15:27]

Apa ... TPS yang Saudara minta agar dilakukan PSU, ya?

123. KUASA HUKUM PEMOHON 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [15:33]

Ya.

124. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [15:34]

Saya ingin tanya ini, di 17 ini ... apa ... Pemohon punya saksi semua di TPS ini?

125. KUASA HUKUM PEMOHON 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [15:40]

Ada, Yang Mulia.

126. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [15:42]

Saksinya tanda tangan, enggak?

127. KUASA HUKUM PEMOHON 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [15:44]

Tanda tangan, Yang Mulia.

128. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [15:45]

Tanda tangan.

129. KUASA HUKUM PEMOHON 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [15:45]

Ya.

130. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [15:45]

Tapi memberikan catatan khusus, enggak?

131. KUASA HUKUM PEMOHON 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [15:49]

Ada, Yang Mulia.

132. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [15:50]

Ada semua?

133. KUASA HUKUM PEMOHON 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [15:51]

Ada.

134. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [15:52]

Oke, jadi tanda tangan (...)

**135. KUASA HUKUM PEMOHON 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
PARULIAN SIREGAR [15:54]**

Ya.

136. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [15:54]

Tapi dengan catatan khusus (...)

**137. KUASA HUKUM PEMOHON 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
PARULIAN SIREGAR [15:55]**

Ya.

138. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [15:55]

Begitu?

**139. KUASA HUKUM PEMOHON 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
PARULIAN SIREGAR [15:56]**

Ya, Yang Mulia.

140. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [15:57]

Nanti dijadikan bukti?

**141. KUASA HUKUM PEMOHON 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
PARULIAN SIREGAR [15:58]**

Sudah dijadikan bukti (...)

142. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [15:59]

Oke (...)

**143. KUASA HUKUM PEMOHON 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
PARULIAN SIREGAR [15:59]**

Yang Mulia.

144. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [15:59]

Baik.

Yang kedua ini kan disebutkan bahwa atas dugaan pelanggaran ini kemudian diadakan ke Bawaslu setempat?

145. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [16:11]

Bawaslu, betul.

146. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [16:12]

Apa kemudian respons Bawaslu? Terlepas nanti Bawaslu jawabannya apa, ya.

147. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [16:17]

Tidak ... tidak ada respons, Yang Mulia.

148. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [16:21]

Eenggak ... tidak ada renpons?

149. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [16:22]

Ada ... ada sebagian, dikatakan tidak terfaktakan, tapi sebagian banyak besar tidak ada ... tidak ada jawaban.

150. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [16:24]

Tidak ada jawab? Apakah misalnya jawabannya tidak memenuhi syarat formil atau syarat materiil, enggak ada juga?

151. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [16:32]

Ada.

152. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [16:33]

Ada?

153. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [16:34]

Ada, ada beberapa TPS.

154. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [16:36]

Oke. Dijadikan bukti, enggak?

155. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [16:38]

Dijadikan bukti semua, Yang Mulia.

156. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [16:38]

Dijadikan bukti. Oke, baik.
Saya kira itu saja, Yang Mulia.

157. KETUA: SALDI ISRA [16:42]

Terima kasih, Yang Mulia.
Yang Mulia Pak Ridwan, silakan.

158. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [16:47]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.
Saudara Kuasa Pemohon, ya. Ini TSM-nya ini tidak kurang dari 12 halaman, ya? Nah, ini kan Saudara sudah menindaklanjuti itu ke ... apa ... petugas, ke Bawaslu, dan panwaslih juga, ya?

159. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [17:11]

Ya.

160. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [17:11]

Kan sudah panjang nih waktunya ini. Tidak ada sama sekali respons ... bahkan ini ada juga cenderung ke pidana pemilu. Apa yang Saudara ... ada enggak bukti yang Saudara lampirkan di dalam Permohonan ini?

161. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [17:27]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami tadi pagi ... kemarin sebenarnya menyampaikan alat bukti itu juga, alat bukti tambahan dari P-48 sampai P-61.

162. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [17:43]

He em.

163. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [17:43]

Dengan harapan, sebelum Permohonan ini kami bacakan, Majelis telah membaca dan melihat alat-alat bukti tersebut. Tapi di bawah, Petugas mengatakan besok saja pada saat persidangan diserahkan ke Paniteranya.

Perlu kami sampaikan, Yang Mulia, di saat ini ... di Permohonan ini ... pembacaan Permohonan ini, bukti yang kami baru sampaikan tadi pagi, bukti video 48, video nomor 50, 51, 52[sic!], 53 itu adalah video keterlibatan penyelenggara, khususnya PPK Kecamatan Banda Sakti.

164. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [18:27]

Ya, enggak apa-apa. Nanti Saudara itu pertahankan itu (...)

165. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [17:30]

Ya.

166. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [18:32]

Apa yang diadu di sini nanti.

167. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [17:32]

Betul.

168. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [18:33]

Ya.

169. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [17:33]

Kkenapa, Yang Mulia, saya sampaikan (...)

170. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [18:36]

Hanya bukti yang bicara.

171. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [17:37]

Ya, betul. Kenapa kami sampaikan dalam Permohonan ini, pada saat membaca Permohonan ini karena bukti tersebut baru kami terima tanggal 5 Januari, sehingga kami tidak ... tidak masukkan di dalam dalil. Padahal video tersebut, bukti tersebut sangat sangatlah penting.

172. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [18:55]

Ya, baik, baik. Ya, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

173. KETUA: SALDI ISRA [19:01]

Cukup? Cukup, ya?

174. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [19:01]

Cukup, Yang Mulia.

175. KETUA: SALDI ISRA [19:02]

Oke. Terima kasih.
Kita lanjut sekarang untuk Perkara 52, silakan.

176. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH. SALMAN DARWIS [19:02]

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih atas kesempatannya, Yang Mulia.

Untuk Pemohon dari Perkara 52, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Rusihan Jafar dan Muhtar Sumaila.

Kemudian untuk Kewanangan Mahkamah Konstitusi, kami anggap dibacakan.

Tenggang Waktu, kami anggap dibacakan.

Kedudukan Hukum. Selisih antara Pemohon dan Pihak Terkait berada di angka 16.930 atau melebihi tenggang waktu, tapi perolehan suara pasangan (...)

177. KETUA: SALDI ISRA [19:53]

Bukan tenggang waktu, melebihi ketentuan 158.

178. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH. SALMAN DARWIS [19:57]

Ya, melebihi (...)

179. KETUA: SALDI ISRA [19:58]

Ini karena sudah lama enggak muncul, jadi enggak mau menyampaikan apa, begitu. Silakan.

180. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [20:03]

Melebihi selisih (...)

181. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [20:04]

Maaf, Yang Mulia (...)

182. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [20:06]

Suara (...)

183. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [20:06]

Yang Mulia (...)

184. KETUA: SALDI ISRA [20:06]

Ya.

185. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [20:07]

Karena kami sudah selesai, kami mundur ke belakang biar (...)

186. KETUA: SALDI ISRA [20:08]

Alhamdulillah, silakan.

187. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [20:10]

Biar teman kami biar lebih nyaman, gitu (...)

188. KETUA: SALDI ISRA [20:12]

Ini sesama Advokat itu saling bertoleransi, itu enak kelihatannya. Silakan.

189. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [20:16]

Terima kasih.

190. KETUA: SALDI ISRA [20:16]

Silakan.

191. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [20:19]

Melibihi ... saya ulang, Yang Mulia.

192. KETUA: SALDI ISRA [20:19]

Ya.

193. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [20:19]

Melibihi ambang batas selisih suara 1,5%, perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak tersebut diperoleh karena adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

Dalam Permohonan ini, kami membagi klaster pelanggaran TSM itu dalam 7 klaster, Yang Mulia.

194. KETUA: SALDI ISRA [20:00]

Ya.

195. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [20:00]

Yang pertama, penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan.

196. KETUA: SALDI ISRA [20:57]

Siapa yang menggantinya?

197. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [20:57]

Bupati Petahana, Yang Mulia, yang (...)

198. KETUA: SALDI ISRA [21:00]

Siapa itu Bupati Petahana?

199. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [21:01]

Hasan Ali Bassam Kasuba, Helmi ... Hasan Ali Bassam Kasuba, Nomor Urut 3, Yang Mulia.

200. KETUA: SALDI ISRA [21:17]

Oke, jadi yang peraih suara terbanyak ini incumbent, ya?

201. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [21:17]

Incumbent, Yang Mulia.

202. KETUA: SALDI ISRA [21:18]

Wakilnya incumbent juga?

203. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [21:20]

Bukan, Yang Mulia.

204. KETUA: SALDI ISRA [21:21]

Oke, lanjut.

205. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [21:24]

Kemudian yang klaster kedua, nanti satu persatu kami akan jelaskan. Penggunaan kewenangan program dan kegiatan pemerintah untuk Pemenangan Calon Petahana dalam kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2024.

Yang ketiga, money politics dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera yang dilakukan oleh Calon Petahana.

Yang keempat, mobilisasi aparat sipil negara secara signifikan untuk memenangkan Calon Petahana.

Yang kelima, polita ... politisasi dana hibah untuk kepentingan kemenangan.

Yang keenam, panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara terindikasi tidak netral.

Dan yang terakhir, Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan terbukti tidak independen dan profesional.

Untuk klaster pertama, Yang Mulia, berkaitan dengan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon. Jadi, Pihak Terkait dalam kapasitas sebagai Calon Petahana melakukan penggantian atau pemberhentian sementara terhadap 3 kepala desa, Yang Mulia.

Yang pertama, Kepala Desa Tawa, Kabupat ... Kecamatan Gane Barat Selatan pada tanggal 25 November 2024.

Kemudian yang kedua (...)

206. KETUA: SALDI ISRA [22:51]

Per tanggal berapa pengantiannya?

207. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [22:53]

25 November

208. KETUA: SALDI ISRA [20:55]

2000?

209. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [22:56]

2024.

210. KETUA: SALDI ISRA [22:57]

Apa dia masih jadi bupati?

211. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [23:01]

Setelah cuti, Yang Mulia.

212. KETUA: SALDI ISRA [23:03]

Ya kan, dia ndak bupati lagi ketika itu, kan? November itu?

213. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [23:11]

Pas (...)

214. KETUA: SALDI ISRA [23:12]

Setelah cuti ya? Pas di hari (...)

215. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [23:14]

Hari tenang (...)

216. KETUA: SALDI ISRA [23:15]

Setelah habis masa kampanye, ya?

217. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [23:15]

Ya.

218. KETUA: SALDI ISRA [23:16]

Tanggal 24, balik langsung (...)

219. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [23:18]

Langsung dieksekusi, Yang Mulia.

220. KETUA: SALDI ISRA [23:20]

Oh (...)

221. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [23:20]

Pemberhentian sementara.

222. KETUA: SALDI ISRA [23:21]

Itu di halaman berapa itu?

223. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [23:22]

Halaman 12 sampai 44, Yang Mulia.

224. KETUA: SALDI ISRA [23:25]

Oke, terus.

225. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [23:28]

Kemudian ada penggantian pejabat dalam 3 tahapan, Yang Mulia. Tanggal 16 Agustus 2024, mutasi pejabat atas nama Munawar Abdul Rauf, S.T. menjadi penelaah teknik kebijakan. Kemudian yang kedua, tanggal 19 Maret 2024, mutasi pejabat sela ... sebanyak 77 orang pejabat struktural.

226. KETUA: SALDI ISRA [23:54]

Itu tanggal 24 juga?

227. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [23:57]

Tanggal 19.

228. KETUA: SALDI ISRA [20:00]

19 (...)

229. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [23:58]

Maret 2024, Yang Mulia.

230. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [24:00]

Kan kita bicara 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon, Yang Mulia.

231. KETUA: SALDI ISRA [24:02]

Oke.

232. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [24:04]

Kemudian yang terakhir, tanggal 23 September 2024, mutasi pejabat fungsional sebanyak 142 Aparatur Sipil Negara[sic!].

233. KETUA: SALDI ISRA [24:16]

Tanggal berapa, itu? 23?

234. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [24:17]

23 September 2024.

235. KETUA: SALDI ISRA [24:20]

23 September itu sudah ada penetapan pasangan calon, belum?

236. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [24:22]

Sudah, sudah.

237. KETUA: SALDI ISRA [24:23]

Sudah, ya?

238. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [24:24]

Sudah.

239. KETUA: SALDI ISRA [24:25]

KPU? Sudah ada penetapan pasangan calon enggak 23 September, Halmahera Selatan?

Tanggal berapa penetapan pasangan calon Halmahera Selatan? Eh, masa jawab tanggal satu itu saja? Tanggal berapa penetapan?

240. TERMOHON: THABRID S. TALIB [24:48]

Izin, Yang Mulia. Untuk penetapan pasangan calon di tanggal 23 September.

241. KETUA: SALDI ISRA [24:57]

23 September, ya?

242. TERMOHON: THABRID S. TALIB [24:57]

Siap, Yang Mulia.

243. KETUA: SALDI ISRA [24:58]

Benar, itu?

244. TERMOHON: THABRID S. TALIB [25:00]

Siap, Yang Mulia.

245. KETUA: SALDI ISRA [24:01]

Itu peristiwa tadi pergantian itu tanggal 23 September itu?

246. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [25:04]

23, Yang Mulia.

247. KETUA: SALDI ISRA [25:05]

Oke, lanjut.

248. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [24:09]

Kemudian terhadap jumlah yang tadi kami sampaikan, kami jumlahnya bertambah, Yang Mulia, sudah kami sampaikan dalam daftar alat bukti tambahan, pada hari ini kita ajukan.

249. KETUA: SALDI ISRA [25:21]

Ya.

250. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [25:22]

Kemudian dalil penggunaan kewenangan program dan kegiatan pemerintah untuk pemenangan Calon Petahana, itu didasarkan pada pembagian bantuan sosial berupa beras, mesin potong rumput, uang tunai untuk memenangkan Pasangan Calon Petahana yang dilakukan oleh Aparatur Kepala Desa, Yang Mulia.

Yang pertama, Kepala Desa Doro, Kecamatan Gane Barat Selatan pada tanggal 20 November 2024.

Yang kedua, Kepala Desa Talimau, Kecamatan Kayoa, 24 November 2024.

Dan yang ketiga, Kepala Desa kal ... Galala, Kecamatan Obi[sic!] Utara beserta jajarannya pada tanggal 25 dan 26 November 2024.

251. KETUA: SALDI ISRA [26:05]

Oke.

252. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [26:06]

Selanjutnya. Sebanyak 28 orang di 23 desa dari 12 kecamatan menandatangani surat pernyataan terkait pemerintah desa dan tim sukses atas perintah Calon Petahana.

253. KETUA: SALDI ISRA [26:22]

Ada tanda tangannya?

254. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [26:23]

Ada, Yang Mulia.

255. KETUA: SALDI ISRA [26:23]

Ada buktinya, ya?

256. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [26:26]

Ada, Yang Mulia.

257. KETUA: SALDI ISRA [26:27]

Oke, lanjut.

258. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [26:29]

Untuk membagikan bantuan langsung tunia ... tunai guna kemenangan Paslon Nomor Urut 3.

Selanjutnya, terdapat 36 orang di 27 di ... desa dari 17 kecamatan menandatangani surat pernyataan terkait pemerintah desa, ASN, dan tim sukses membagikan bansos kepada masyarakat untuk kemenangan Paslon Nomor Urut 3.

259. KETUA: SALDI ISRA [26:55]

Oke, apa lagi?

260. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [26:57]

Selanjutnya, berkaitan money politics, ada keterlibatan dari kepala desa dan Aparatur Sipil Negara. Untuk Aparatur Sipil Negara, dilakutak ... dilakukan oleh Kepala Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Gafur Ahmad, S.E., membagikan uang Rp50.000,00 kepada masyarakat Desa Labuha, Kecamatan Bacan, dan menunjukkan simbol jari 3 sebagaimana Nomor Urut Petahana, Yang Mulia.
Kemudian (...)

261. KETUA: SALDI ISRA [27:29]

Oke. Tiganya, begini?

262. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [27:32]

Ya.

263. KETUA: SALDI ISRA [27:32]

Ada pakai batu bacan, enggak?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [27:38]

Belum dikopi soal batu bacannya, Yang Mulia.

264. KETUA: SALDI ISRA [27:38]

Silakan, lanjut.
Ini Rp50.000,00, ya?

265. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [27:41]

Rp50.000,00, Yang Mulia.

266. KETUA: SALDI ISRA [27:42]

Diberikan kepada masyarakat Desa Labuha. Berapa banyak itu masyarakat yang menerima?

267. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [27:48]

Belum kami dapat konfirmasi jumlahnya.

268. KETUA: SALDI ISRA [27:50]

Oke.

269. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [27:50]

Tapi signifikan, Yang Mulia.

270. KETUA: SALDI ISRA [27:52]

Ya. Ya, kata ... kata Pemohon, ya semuanya signifikan, begitu. Tapi kan harus dibuktikan, begitu.

Lanjut.

271. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [27:59]

Kemudian yang dilakukan oleh Kepala Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur membagikan uang sebesar Rp150.000,00 untuk memilih Paslon Nomor Urut 3, pada tanggal (...)

272. KETUA: SALDI ISRA [28:08]

Tidak tahu juga berapa yang dibagikan?

273. KUASA HUKUM PEMOHON 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [28:08]

Ya, Yang Mulia.

274. KETUA: SALDI ISRA [28:11]

Berapa orang yang menerima, enggak tahu juga?

275. KUASA HUKUM PEMOHON 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [28:12]

Enggak tahu, Yang Mulia.

276. KETUA: SALDI ISRA [28:12]

Oke. Lanjut.

277. KUASA HUKUM PEMOHON 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [28:14]

Itu dilakukan pada Tanggal 27 November 2024. Kemudian (...)

278. KETUA: SALDI ISRA [28:20]

Ini pagi-pagi sekali, ya?

279. KUASA HUKUM PEMOHON 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [28:22]

Ya. Sepertinya serangan fajar, Yang Mulia.

280. KETUA: SALDI ISRA [28:29]

Ya.

281. KUASA HUKUM PEMOHON 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [28:29]

Kemudian oleh mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Periode 2009-2024 atas nama Yaret Colling membagikan uang sebesar Rp100.000,00 ora ... per orang di Desa Bobo Kecamatan Obi Selatan pada Tanggal 27 November 2024.

282. KETUA: SALDI ISRA [28:46]

Oke.

283. KUASA HUKUM PEMOHON 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [28:48]

Kemudian, mobilisasi aparat sipil negara secara signifikan untuk pemenangan paslon petahana, ada mobilisasi oleh pelaksana tugas dan kepala dinas yang dilakukan oleh Plt. Inspektur ... Inspektorat Halmahera Selatan atas nama Ilham Abubakar, S.H., dia memanggil Kepala Desa se-Kecamatan Gane Barat dan Gane Timur Tengah serta memberikan ... agar ... memberikan arahan agar selalu bersama-sama dengan Petahana, Yang Mulia.

284. KETUA: SALDI ISRA [29:17]

Itu (...)

285. KUASA HUKUM PEMOHON 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [29:17]

Tanggal (...)

286. KETUA: SALDI ISRA [29:17]

Di 2 kecamat ... kecamatan itu dipanggil kepala desanya?

287. KUASA HUKUM PEMOHON 5252/PHPU.BUP-XXIII/20: MUH SALMAN DARWIS [29:21]

Betul, Yang Mulia.

288. KETUA: SALDI ISRA [29:22]

Ada bukti?

289. KUASA HUKUM PEMOHON 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [29:23]

Ada, Yang Mulia.

290. KETUA: SALDI ISRA [29:24]

Bukti berapa? Bukti P-1 ... 114, ya?

291. KUASA HUKUM PEMOHON 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [29:41]

Sebentar, Yang Mulia, kami cross-check, ya. Buktinya agak banyak.

292. KETUA: SALDI ISRA [29:44]

Ya. Jangan ditakut-takutin Pihak Terkait dengan KPU itu. Nanti jangan-jangan mereka punya bukti lebih banyak lagi untuk mementahkan.

293. KUASA HUKUM PEMOHON 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [29:55]

Benar, Yang Mulia. 114.

294. KETUA: SALDI ISRA [29:57]

Oke, lanjut!

295. KUASA HUKUM PEMOHON 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [30:05]

Kemudian, oleh Plt. Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa atas nama Dr. Iksan Mursid mengintibasi ... mengintimidasi Kepala Desa Ngokomalako, Kecamatan Kayoa Utara melalui pesan aplikasi WhatsApp untuk pemenangan paslon petahana. Itu dilakukan (...)

296. KETUA: SALDI ISRA [30:23]

Ada bukti, apli ... apanya ... apanya ... screen captures-nya, ada?

297. KUASA HUKUM PEMOHON 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [30:28]

Tidak ada, Yang Mulia. Tapi berdasarkan link berita yang sudah kami ajukan dalam (...)

298. KETUA: SALDI ISRA [30:33]

Oke (...)

299. KUASA HUKUM PEMOHON 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [30:33]

Bukti tambahan.

300. KETUA: SALDI ISRA [30:34]

Lanjut!

301. KUASA HUKUM PEMOHON 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [30:36]

Kemudian ada moli ... mobilisasi yang dilakukan oleh kepala desa dan Aparatur Sipil Negara.

302. KETUA: SALDI ISRA [30:41]

Ya.

303. KUASA HUKUM PEMOHON 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [30:42]

Di Kecamatan Obi misalnya, kepala desa mengadakan rapat dengan kepala sekolah tingkat taman kanak-kanak se-Kecamatan Obi dan mengarahkan peserta rapat untuk memilih Petahana, dilakukan pada 26 Oktober 2024. Kemudian ada tokoh masyarakat (...)

304. KETUA: SALDI ISRA [31:04]

Oke. Cukup itu, ya. Langsung politisasi dana hibah untuk kepentingan pemenangan.

305. KUASA HUKUM PEMOHON 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [31:08]

Baik, Yang Mulia.

Di dana hibah, ada hibah terhadap Universitas Nurul Hasan yang secara langsung maupun langsung karena ada kekebera ... kekerabatan antara Petahana dengan yayasan ... ketua yayasan, maka ada potensi untuk mengarahkan mahasiswa dan mahasiswi untuk memilih calon Petahana.

Kemudian, pembagian beasiswa kurang mampu senilai 1 Miliar di UNSAN[sic!] yang dibagikan langsung oleh Petahana kepada mahasiswa.

Kemudian, ada penyelenggaraan umroh gratis bagi imam dan wakil imam berjumlah 60 orang untuk mendongkrak keterpilihan calon Petahana.

Kemudian, ada program rekrutmen DAI untuk ... sama, memoles kinerja pasangan calon petahana, Yang Mulia.

Kemudian untuk (...)

306. KETUA: SALDI ISRA [32:00]

Tapi ini ada yang bulan Juni, ya? Kalau yang 4,1 Miliar itu.

307. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH. SALMAN DARWIS [32:07]

Ya, benar, Yang Mulia.

308. KETUA: SALDI ISRA [32:07]

Kalau yang untuk ... apa ... untuk imam masjid itu bulan apa?

309. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH. SALMAN DARWIS [32:14]

September, Yang Mulia, sampai Oktober.

310. KETUA: SALDI ISRA [32:16]

September sampai Oktober. Kemudian yang rekrutmen DAI yang 30 orang itu?

311. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH. SALMAN DARWIS [32:22]

Bulan Juli 2024, Yang Mulia.

312. KETUA: SALDI ISRA [32:24]

Oke, bulan Juli.

Lanjut, panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan surat terindikasi tidak netral. Nah, silakan, apa itu indikasinya?

313. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH. SALMAN DARWIS [32:32]

Indikasinya pada saat rekrutmen PPK dan PPS itu kan dia dilakukan oleh komisioner terdahulu, Yang Mulia.

314. KETUA: SALDI ISRA [32:39]

Oke.

315. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH. SALMAN DARWIS [32:40]

Komisioner terdahulu dari Komisi Pemilihan Kabupaten Halmahera merupakan tim pemenangan Calon petahana untuk saat ini. Jadi (...)

316. KETUA: SALDI ISRA [32:49]

Ini namanya logika disambung-sambungkan, begitu. Yang penting ada sambungannya, begitu, ya.

317. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH. SALMAN DARWIS [32:53]

Itu menurut penalaran yang wajar, Yang Mulia.

318. KETUA: SALDI ISRA [32:55]

Silakan lanjut. Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Halmahera tidak independen dan tidak profesional. Apa itu?

319. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH. SALMAN DARWIS [33:01]

Karena laporan terhadap pelanggaran yang kami ajukan sebagian besar tidak ditanggapi secara profesional dan cenderung terabaikan.

320. KETUA: SALDI ISRA [33:09]

Oke, nanti akan dijawab oleh Bawaslu.
Lanjut, Petitem.

321. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRULLAH [33:12]

Petitem akan disampaikan oleh rekan kami, Yang Mulia. Terima kasih.

322. KETUA: SALDI ISRA [33:16]

Silakan.

323. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRULLAH [33:17]

Baik, terima (...)

324. KETUA: SALDI ISRA [33:17]

Kalau yang tukang baca Petitum itu dapatnya 10%. Kalau yang menguraikan itu 90%.

325. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRULLAH [33:23]

Nanti diatur, Yang Mulia.

326. KETUA: SALDI ISRA [33:24]

Silakan.

327. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRULLAH [33:25]

Baik, terima kasih atas kesempatannya.

Untuk Petitum.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 00.01 WIT.
3. Menetapkan perolahan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolahan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut.
 1. Bahrain Kasuba dan (...)

328. KETUA: SALDI ISRA [34:23]

Dianggap dibacakan, ya?

329. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRULLAH [34:26]

Dianggap dibacakan.

Atau memerintahkan kepada Termohon untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 815 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan dalam Pemilihan Tahun 2024 atau mendiskualifikasi kepesertaan Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muhsin sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 karena melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.

Atau memerintahkan kepada Termohon untuk ... dianggap dibacakan, Yang Mulia.

330. KETUA: SALDI ISRA [35:03]

Dibacakan semua.

331. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRULLAH [35:06]

Atau membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan (...)

332. KETUA: SALDI ISRA [35:09]

Itu sudah tadi.

333. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRULLAH [35:10]

Sudah. Double, Yang Mulia.

Atau memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Kayoa, Kecamatan Kayoa Barat, Kecamatan Kayoa Selatan, Kecamatan Bacan, Kecamatan Bacan Selatan, Kecamatan Bacan Barat, Kecamatan Bacan Barat Utara, Kecamatan Kasiruta Timur, Kecamatan Botang Lomang, Kecamatan Mandioli Utara, Kecamatan Mandioli Selatan, Kecamatan Gane Barat, Kecamatan Gane Timur, Kecamatan Gane Timur Tengah, Kecamatan Gane Timur Selatan, Kecamatan Kepulauan Joronga, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kecamatan Obi Selatan (...)

334. KETUA: SALDI ISRA [35:47]

Itu semua kecamatan, itu?

335. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRULLAH [35:49]

21 kecamatan, Yang Mulia.

336. KETUA: SALDI ISRA [35:51]

Oke.

337. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRULLAH [35:52]

Atau memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara di seluruh Kabupaten Halmahera Selatan, tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin,.

Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

338. KETUA: SALDI ISRA [36:14]

Cukup?

339. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRULLAH [36:15]

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

340. KETUA: SALDI ISRA [36:16]

Nah ini pertanyaan yang harus dijawab oleh Kuasa Hukum.

Itu kan alternatif ya, ada 7 alternatifnya. Ya, kan? Pak Salman, betul ya?

341. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [36:26]

Betul, Yang Mulia.

342. KETUA: SALDI ISRA [36:28]

Coba jawab pertanyaan pertama.

Itu angka 4 alternatif untuk angka berapa di Petikum itu? Jadi, ini jangan asal bikin-bikin saja ini. Sekarang polanya para lawyer, para advokat itu bikin alternatif sampai 12 kali jenjang begini. Nah, harus dijelaskan itu. Yang 4 ini alternatif untuk nomor berapa?

343. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [36:52]

Untuk nomor 5, Yang Mulia. Hampir sama sebenarnya.

344. KETUA: SALDI ISRA [36:55]

Bukan, bagaimana pula nomor 4 ke nomor 5 alternatifnya? Kan ... atau ... Ini kan *atau* nya duluan ya setelah tabel?

345. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [37:06]

Ya, Yang Mulia.

346. KETUA: SALDI ISRA [37:07]

Nah ini, yang nomor 4 ini alternatif untuk nomor berapa? Jangan-jangan yang bikin enggak ngerti juga, yang penting dibikin saja kayak begini-begini, begitu.

347. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [37:15]

Artinya, kami mencoba mengakomodir Permohonannya, Yang Mulia.

348. KETUA: SALDI ISRA [37:20]

Ya, sudah pasti itu (...)

349. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [37:21]

Permohonannya berbicara soal diskualifikasi.

350. KETUA: SALDI ISRA [37:23]

Nah, ini penting lho untuk menentukan apakah ini Petitemnya bisa diterima atau tidak, maka kita harus jelas dulu. Nah, 4 alternatif untuk nomor berapa? 5 itu alternatif untuk apa? 6 itu alternatif untuk apa? 7 alternatif untuk apa?

351. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [37:40]

Nomor 4 itu alternatif untuk pembatalan kepesertaan[sic!], Yang Mulia. Kemudian yang kelima.

352. KETUA: SALDI ISRA [37:47]

Alternatif untuk?

353. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [36:01]

Pelanggaran juga tapi spesifik (...)

354. KETUA: SALDI ISRA [37:50]

Bukan, Kalau alternatif itu begini. Ini Saldi, alternatifnya Ridwan, jelas. Jadi Ridwan menjadi alternatif terhadap Saldi. Nah, makanya sekarang yang Nomor 4 itu alternatif terhadap nomor berapa?

355. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [38:05]

Baik, Yang Mulia. Relatif hampir sama semua, Yang Mulia.

356. KETUA: SALDI ISRA [38:08]

Oke. Jadi, hati-hati juga ya, ini bikin-bikin yang kayak begini, nih. Ini modifikasi-modifikasi para lawyer ini, aduh bikin Hakim pusing saja ini.

357. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [38:17]

Mudah-mudahan (...)

358. KETUA: SALDI ISRA [38:18]

Ada yang mau disampaikan, Yang Mulia? Pak Arsul?

359. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [38:23]

Sedikit, ya. Ini pertama tadi yang disampaikan Pak Ketua Panel, ya. Ini kalau bikin ini para lawyer itu jangan terindikasi gitu, terbukti tidak netral. Ini satu sudah, tapi yang satu terindikasi. Kalau terindikasi itu namanya baru suudzon ini tingkatannya.

Nah yang kedua, ini kan salah satu yang didalilkan adalah soal money politics. Ini dilaporkan enggak?

360. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [38:55]

Sudah kami laporkan, Yang Mulia (...)

361. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [38:57]

Ya, apa tanggapan Bawaslu?

362. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [38:59]

Pada waktu itu karena laporan kami sama dengan paslon yang lain, dianggap laporan kami tidak diregistrasi, Yang Mulia. Karena secara substansi sama.

363. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [38:08]

Sama, laporan paslon yang lain?

364. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [38:11]

Diterima, Yang Mulia.

365. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [38:12]

Diterima, terus apa? Di kasus itu, kasus money politics, terlepas siapa yang pelapor?

366. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [38:17]

Untuk kepala desa, untuk Plt, sebagaimana alat bukti tambahan kami.

367. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [38:25]

He eh.

368. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [38:26]

Itu menurut (...)

369. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [38:28]

Lanjut ke Gakkumdu, enggak? sudah pertanyaannya itu, (ucapan tidak terdengar jelas) pidana ini.

370. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [38:31]

Menurut link berita yang kami dapatkan, Bawaslu Halmahera Selatan menyatakan bahwa memenuhi syarat formil dan materiil, Yang Mulia. Cuma, hingga saat ini kami belum mengonfirmasi lebih lanjut proses dari laporan yang sudah dinyatakan memenuhi syarat tersebut.

371. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [38:54]

Ya, harusnya bisa diproses dong, itu kan bukan bukti yang signifikan tadi, istilah Saudara, kan? Gitu.

372. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [40:02]

Baik, Yang Mulia.

373. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [40:03]

Jadi, itu ya.

Nah yang berikutnya adalah tadi ada berapa? 60 pejabat mutasi, promosi, begitu kan?

374. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [40:12]

Leb ... banyak, Yang Mulia.

375. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [40:13]

Banyak. Okelah, jumlahnya.

Pertanyaannya, di antara yang mendapat promosi itu, kemudian ikut enggak dalam mengampanyekan atau menyukseskan ya, Pak Bupati Petahana ini, yang mencalonkan kembali? Ada buktinya, enggak?

376. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [40:34]

Sudah kami sampaikan juga dalam alat bukti, Yang Mulia.

377. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [40:37]

Oke.

378. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [40:37]

Dalam permo ... pembaca ... penjelasan Permohonan tadi juga kami sudah jelaskan.

379. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [40:40]

Di alat ... ya, ya, oke. Enggak, yang paling penting itu. Karena enggak klir itu, mestinya kan satu-satu.

380. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [40:45]

Ya.

381. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [40:46]

Gitu, ya?

382. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [40:46]

Baik.

383. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [40:47]

Promosi si A, kemudian melakukan ini. Yang ini, melakukan ini. Yang ini, melakukan ini. Kan mestinya kan harus begitu.

384. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [40:55]

Tentu kami punya keterbatasan karena jumlahnya banyak.

385. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [40:58]

He em.

386. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [40:59]

Maka, kami ambil yang paling signifikan-signifikan.

387. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [41:03]

Oke. Ya, nanti kami lihat, ya. Karena kalau bukti kan belum kita periksa.

Oke. Saya kira itu saja, Pak Ketua.

388. KETUA: SALDI ISRA [41:10]

Terima kasih, Yang Mulia.
Yang Mulia Pak Ridwan? Cukup, ya?
Cukup?

389. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUH SALMAN DARWIS [41:19]

Izin, Yang Mulia.
Kami memberikan ruang untuk Pemohon sebelah.
Terima kasih.

390. KETUA: SALDI ISRA [41:24]

Terima kasih, Pak Salman. Silakan.
Biasanya Pak Salman ini ada mentornya ini yang biasanya datang ke Mahkamah Konstitusi. Sekarang sudah ... apa ... single fighter dia.

Itu bawa tas keresek enggak dicegat di luar, ya? Itu masuk barang terlarang dibawa ke ruang sidang itu.

Silakan, 58.

391. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [42:15]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkan, saya Meidi Noldi Kurama dan rekan saya, Bambang Joisangadji, mewakili tim Kuasa Hukum dari Bapak Bahrain Kasuba dan Umar Hi. Soleman.

392. KETUA: SALDI ISRA [42:29]

Ini Kasuba semua, ya?

393. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [42:31]

Ya, Yang Mulia.

394. KETUA: SALDI ISRA [42:32]

Ini nama keluarga atau nama apa ini?

395. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [42:33]

Nama keluarga. Kasuba nama keluarga.

396. KETUA: SALDI ISRA [42:35]

Yang tadi Kasuba juga, kan?

397. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [42:37]

Ya, yang (...)

398. KETUA: SALDI ISRA [42:38]

Yang menang Kasuba juga kan, ujungnya?

399. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [42:40]

Yang menang Kasuba juga.

400. KETUA: SALDI ISRA [42:41]

Waduh.

401. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [42:41]

Ya.

402. KETUA: SALDI ISRA [42:42]

Ini bisa diselesaikan dalam kain sarung saja, semua. Kalau kata orang Padang itu diselesaikan internal itu.
Silakan.

403. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [42:49]

Mohon izin meneruskan, Yang Mulia.

404. KETUA: SALDI ISRA [42:51]

Ya, diteruskan.

405. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [42:52]

Untuk menyampaikan Permohonan pembatalan keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024, pukul 00.01 WIT, Yang Mulia.

Sebelumnya, kami juga akan mengajukan tambahan alat bukti baru, Yang Mulia.

406. KETUA: SALDI ISRA [43:15]

Nanti. Sampaikan saja permohonannya dulu.

407. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [43:18]

Oh, ya.

408. KETUA: SALDI ISRA [43:18]

Ya.

409. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [43:19]

Siap, Yang Mulia.

410. KETUA: SALDI ISRA [43:20]

Anda disuruh nyampaikan Permohonan. Lain lagi yang (ucapan tidak terdengar jelas).

411. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [43:21]

Siap.

412. KETUA: SALDI ISRA [43:22]

Silakan.

413. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [43:23]

Ya.

Untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

414. KETUA: SALDI ISRA [43:31]

Ya.

415. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [43:33]

Kemudian untuk ... untuk tegang ... Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, mohon dianggap dibacakan juga, Yang Mulia.

416. KETUA: SALDI ISRA [43:38]

Ya, silakan.

417. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [43:40]

Ya.

Untuk Kedudukan Hukum Pemohon. Pada intinya, kami ingin menunda pemberlakuan Pasal 158, Yang Mulia.

418. KETUA: SALDI ISRA [43:48]

Ya, lanjut.

419. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [43:49]

Ya. Selanjutnya pada Pokok Perkara, Yang Mulia.

420. KETUA: SALDI ISRA [43:58]

Silakan.

421. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [43:59]

Ya. Bahwa hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan suatu proses yang bertentangan dengan asas pemilu yang Luber Jurdil. Oleh karena itu, suara yang diperoleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dan kedaulatan rakyat yang genuine. Tetapi karena tekanan dari perasaan ketakutan yang luar biasa, berkuasanya incumbent yakni Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas Nama Hasan Ali Bassam Kasuba yang menggerakkan atau melibatkan Aparatur Sipil Negara, kepala dinas, kepala sekolah, kepala puskesmas, kepala sekolah menengah pertama, kepala sekolah dasar, serta politik uang dan/atau setidak-tidaknya pemilukada yang terselenggara pada Tanggal 27 November di Kabupaten Halmahera Selatan merupakan pemilukada dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak pidana kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai tindakan terstruktur, sistematis, dan masif.

Pemilukada yang dihasilkan dari proses tersebut atas merupakan pelanggaran pemilukada yang tidak benar dan/atau setidak-tidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan,

serta mempunyai kaitan langsung dan mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara berdasarkan hasil penghitungan suara oleh Termohon.

Tabel 1.b, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

422. KETUA: SALDI ISRA [45:15]

Ya.

423. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [45:15]

Kami lanjut (...)

424. KETUA: SALDI ISRA [45:16]

Ini (...)

425. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [45:17]

Pada Poin 2 (...)

426. KETUA: SALDI ISRA [45:17]

Ini, kok enggak ada nama-namanya ini? Pasangan Nomor Calon 1, 2, enggak diisi nama. Kenapa?

427. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [45:24]

Ya, kami tidak mengisi nama, Yang Mulia. Tapi yang untuk calon itu Calon Petahana (...)

428. KETUA: SALDI ISRA [45:29]

Ya, siap. Yang saya tanya ya kenapa enggak diisi namanya itu, kalau (...)

429. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [45:31]

Mohon maaf, Yang Mulia kami tidak menuliskan nama di situ.

430. KETUA: SALDI ISRA [45:34]

Ya. Sudahlah, saya maafkan saja (...)

431. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [45:35]

Tapi ... ya (...)

432. KETUA: SALDI ISRA [45:36]

Lanjut (...)

433. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [45:36]

Kami lanjutkan, Yang Mulia, pada Poin 2.

Bahwa masyarakat di Kabupaten Halmahera Selatan masih menginginkan Pemohon agar menjadi Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Halmahera Selatan (...)

434. KETUA: SALDI ISRA [45:44]

Oke, cukup. Lanjut ke-3.

435. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [45:56]

Ya. Bahwa menurut Pemohon, dalam pelaksanaan kepala ... Pemilihan Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati di Kabupaten Halmahera Selatan, terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di hampir seluruh wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, meliputi wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Obi, Kecamatan Obi Selatan, Kecamatan Obi Timur, Kecamatan Obi Timur Tengah, dan Kecamatan Gane Barat Utara di 249 Desa. Yang Mulia, mohon izin. (...)

436. KETUA: SALDI ISRA [46:13]

Ini ... ini daftarnya, ya?

437. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [46:14]

Ya. Untuk (...)

438. KETUA: SALDI ISRA [46:14]

Tapi bentuk TSM-nya di 249 desa ini, apa bentuknya ini?

439. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [46:20]

Bansos, Yang Mulia.

440. KETUA: SALDI ISRA [46:22]

Ya, di mana Anda uraikan itu?

441. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [46:24]

Ada di (...)

442. KETUA: SALDI ISRA [46:26]

Oke, lanjut.

443. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [46:27]

Ya.

444. KETUA: SALDI ISRA [46:27]

Halaman 18.

445. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [46:29]

Ya, kami lanjut di Halaman 18, Yang Mulia.

446. KETUA: SALDI ISRA [46:30]

Ya. Ini separuh daftar desa saja isinya Permohonannya ini?

447. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [46:34]

Ya.

448. KETUA: SALDI ISRA [46:35]

Silahkan lanjutkan.

449. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [46:35]

Ya, untuk jenis-jenis pelanggaran bersifat terstruktur, Yang Mulia. Bahwa telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, ditem ... ditemukan mulai dari penyelenggara sampai pada birokrasi. Terdapat arahan-arahan dari pejabat dan/atau pimpinan di atas kepada ... kepada bawahannya, yakni pada Tanggal 17 Oktober 2024, 1 bulan menjelang pencoblosan. Terdapat silaturahmi antara bupati, incumbent atau Petahana Nomor 3 di Pulau Obi yang sengaja dirancang untuk memberikan instruksi terstruktur untuk mengerahkan para camat, kepala sekolah, kepala rumah sakit, kepala puskesmas yang terlibat atau setidaknya ikut memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin yang sebagai incumbent atau petahana, Yang Mulia.

450. KETUA: SALDI ISRA [47:23]

Lanjut.

451. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [47:23]

Yang Mulia, kami lanjut langsung pada Halaman 22, Yang Mulia.

452. KETUA: SALDI ISRA [47:30]

Oke. Yang selebihnya dianggap dibacakan, ya?

453. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [47:32]

Ya, dianggap dibacakan.

454. KETUA: SALDI ISRA [47:33]

22 itu poin[sic!] berapa?

455. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [47:34]

22 huruf h, Yang Mulia.

456. KETUA: SALDI ISRA [47:36]

H, silakan.

457. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [47:37]

Bahwa Termohon sengaja menyusun rencana menghalangi agar Pemohon tidak bisa menjadi dan[sic!] Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, hal tersebut terlihat dari ... terlihat bahwa Termohon meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang tidak memenuhi syarat formil pencalonan berupa Surat Keterangan Bebas Utang. Sehingga, diduga ada syarat bebas utang baik secara pribadi atau persorangan atau badan hukum yang menjadi tanggungan dari pasangan calon tersebut (...)

458. KETUA: SALDI ISRA [48:02]

Pasangan calon berapa yang tidak bebas utang ini?

459. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [48:05]

Yang Mulia, mohon izin, untuk Pasangan Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor 3 dan Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2.

460. KETUA: SALDI ISRA [48:14]

Oke.

461. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [48:14]

Ya.

462. KETUA: SALDI ISRA [48:15]

Utangnya berapa? Ada jumlahnya enggak diketahui?

463. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [48:21]

Ya. Untuk pasangan calon dari Nomor Urut 3 untuk wakil, itu ada putusan pengadilan, utangnya itu Rp950.000.000,00.

464. KETUA: SALDI ISRA [48:33]

Rp950.000.000,00.

465. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [48:34]

Ya.

466. KETUA: SALDI ISRA [48:35]

Putusan pengadilannya ada?

467. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [48:37]

Ada kwitansi, Yang Mulia.

468. KETUA: SALDI ISRA [48:38]

Bukan. Putusan pengadilan (...)

469. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [48:39]

Ada putusan, ada putusan.

470. KETUA: SALDI ISRA [48:42]

Ada putusan, ya. Pertanyaan saya tadi, ada putusannya enggak?

471. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [48:44]

Ada putusan, Yang Mulia.

472. KETUA: SALDI ISRA [48:45]

Dijadikan bukti, enggak?

473. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [48:46]

Ada dijadikan bukti.

474. KETUA: SALDI ISRA [48:47]

Bukti berapa?

475. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [48:55]

P-18, Yang Mulia.

476. KETUA: SALDI ISRA [48:57]

Oke, saya catat dulu, P-18.

477. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [48:59]

Ya.

478. KETUA: SALDI ISRA [49:00]

Itu kwitansi tadi, kwitansi apa?

479. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [49:02]

Kwitansi utang piutang dari Calon Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin.

480. KETUA: SALDI ISRA [49:09]

Dia itu berutangnya ke mana?

481. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [49:11]

Bagaimana, Yang Mulia? Mohon diulangi.

482. KETUA: SALDI ISRA [49:12]

Utang piutang itu antara siapa dengan siapa?

483. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [49:15]

Saudara Ahmad Assegaf dan Helmi Umar Muchsin.

484. KETUA: SALDI ISRA [49:18]

Itu kan perorangan, ya? Individu, ya?

485. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [49:20]

Ya, perorangan.

486. KETUA: SALDI ISRA [49:21]

Oke.

487. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [49:21]

Ya.

488. KETUA: SALDI ISRA [49:23]

Lanjut, apa lagi?

489. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [49:27]

Kami lanjut, Yang Mulia. Tadi (...)

490. KETUA: SALDI ISRA [49:28]

Ya.

491. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [49:29]

Ya.

492. KETUA: SALDI ISRA [49:35]

Apa lagi yang mau dilanjutkan?

493. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [49:36]

Ya.

494. KETUA: SALDI ISRA [49:40]

Poin halaman 22, poin h itu soal utang piutang.

495. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [49:45]

Ya, soal utang piutang.

496. KETUA: SALDI ISRA [49:46]

Katakan ada putusan pengadilan.
Lanjut kalau begitu, jenis-jenis pelanggaran bersifat massif.

497. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [49:57]

Baik, Yang Mulia. Mohon maaf, lama.

498. KETUA: SALDI ISRA [49:58]

Ya. Ada ... atau ada yang tambahkan yang lain soal utang piutang tadi?

499. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [50:02]

Tidak, Yang Mulia.

500. KETUA: SALDI ISRA [50:03]

Oh, enggak ada, ya?

501. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [50:03]

Ya.

502. KETUA: SALDI ISRA [50:05]

Oke.

503. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [50:06]

Untuk yang bersifat massif, politik bansos berupa beras. Bahwa pemberian bansos berupa bantuan beras pada saat menjelang pencoblosan atau setidaknya-tidaknya masih dalam masa kampanye tersebut dapat dikualifikasi sebagai bagian dari tindakan kejahatan politik yang berkedok bansos.

Bahwa terjadi money politics dan pembagian barang sebagai bentuk barter suara untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Bahwa adanya ancaman nonjob, nonaktif, dan mutasi, sehingga para pejabat, ASN, dan para kepala desa bekerja memenangkan Calon Nomor Urut 3, Yang Mulia.

Bahwa pada saat pencoblosan, terjadi pembagian bantuan sosial beras oleh kepala desa.

Bahwa ada kepala desa dan perangkat desa yang terlibat politik praktis secara langsung karena ditekan serta diancam, mulai dari proses kampanye pada saat pencoblosan dan pemungutan suara.

Bahwa Calon Nomor 3 memberikan tekanan kepada seluruh ASN dan kepala desa untuk memenangkan dirinya.

Bahwa di masa kampanye, guru-guru anak-anak sekolah dasar untuk turut menjemput Pasangan Calon Incumbent Petahana Nomor 3 pada saat pelaksanaan kampanye. Kejadian tersebut terjadi di Desa Bahu, Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan.

Huruf h. Politik uang.

Bahwa telah ditemukan juga tindakan politik uang dan materi lainnya sebagai kejahatan politik.

Bahwa terhadap adanya politik uang dan materi lainnya telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan oleh Pemohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Laporan tersebut dapat dikonfirmasi ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan karena ... sehingga saat ini Pemohon belum mendapatkan konfirmasi tindak lanjut dari Bawaslu kabupaten.

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka telah terjadi kesalahan dan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Termohon dan/atau Pasangan Calon Nomor 3 dan juga dilakukan secara sengaja terstruktur,

sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024. Seluruh tindakan kesala ... kesalahan, pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka sudilah kiranya bilamana Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan bagi Pemohon.

Lanjut ke Petitium, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Huruf,
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024, tertanggal 4 Desember pukul 00.01 WIT.
 - b. Penetapan Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 3 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024, tertanggal 4 Desember, pukul nol nol satu non nol ... 00.01 WIT.
 - c. Penetapan Rusihan Jafar, S.Pd., dan Muhtar Sumaila, S.IP., sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 dan seterusnya, Yang Mulia.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan untuk melaksanakan pemilihan ulang di Kabupaten Halmahera Selatan. Atau,
4. Menyatakan dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku ... Maluku Utara dengan Nomor Urut 1 atas nama Bahrain Kasuba dan Umar Hi. Soleman sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

504. KETUA: SALDI ISRA [54:26]

Oke, Pertanyaan untuk Saudara, itu alternatif 4 itu untuk angka berapa? Kan di halaman 25 itu (...)

505. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [54:35]

Yang di Petitem ya, Yang Mulia?

506. KETUA: SALDI ISRA [54:37]

Ya.

507. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [54:37]

Alternatifnya untuk 2, Yang Mulia.

508. KETUA: SALDI ISRA [54:46]

Ini alternatif 4 ini untuk 2, begitu?

509. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [54:50]

Ya.

510. KETUA: SALDI ISRA [54:49]

Untuk angka 2 ini?

511. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [54:51]

Ya, untuk angka 2.

512. KETUA: SALDI ISRA [54:53]

Oke, berarti itu alternatif 4 itu untuk angka 2, poin a, poin b, poin c (...)

513. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [54:58]

Ya, kumulatif. Karena angka 2 kan kumulatif jadi alternatifnya dari po ... yang tadi 4.

514. KETUA: SALDI ISRA [55:05]

Oke.

515. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [55:05]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

516. KETUA: SALDI ISRA [55:06]

Terima kasih.

Nah, ini harus juga diingat ya, teman-teman dari Advokat ini harus juga belajar prinsip 5W tambah H itu, 1H itu. Jadi harus ... kalau menjelaskan peristiwa itu, itu dijelaskan ... apa namanya ... kapan, di mana, siapa pelakunya, apa peristiwanya, bagaimana itu terjadi, itu harus jelas juga. Jadi enggak cukup menjelaskan, terjadi begini, enggak ada tanggalnya, siapa yang melakukan, bagaimana peristiwa itu. Nah, itu perlu juga diperhatikan itu, yang kayak-kayak begitu. Misalkan kalau enggak ada tanggal sama sekali, kita pikir, kapan peristiwanya ini terjadi.

Pak Ridwan ada yang mau disampaikan? Cukup. Pak Arsul? Silakan.

517. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [55:57]

Ya, terima kasih ...

518. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [56:00]

Terima kasih, Pak Ketua Panel. Ini Pemohon, ya? Saya mau mendalami sedikit, soal utang itu tadi. Itu tadi utang kepada siapa?

519. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [56:10]

Yang Mulia, mohon izin menjelaskan. Jadi utang ini, utang perseorangan, tapi (...)

520. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [56:16]

Ya, utang perseorangan, si calon kepada siapa?

521. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [56:21]

Yang kami dapat jelaskan, Yang Mulia. Yang Pasangan Calon Nomor Urut 3, untuk wakil itu punya utang kepada seseorang yang (...)

522. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [56:31]

Oke.

523. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [56:31]

Mungkin kami sebutkan di sini, Pak Ahmad Assegaf. Dan kemudian (...)

524. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [56:35]

Masalahnya apa kalau dia punya utang perseorangan kepada seseorang?

525. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [56:39]

Ya, Yang Mulia. Karena sesuai dengan syarat formil.

526. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [56:42]

Syarat formil, apa?

527. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [56:44]

Syarat formil, di pasa ... pasangan calon, Pasal 7 Undang Undang Nomor 16, Yang Mulia. Ada (...)

528. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [56:51]

Anda harus baca dengan teliti ya, Pasal 45 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu, utangnya yang merugikan keuangan negara, ya. Kalau bukan ... kalau orang perorangan, saya calon, utang kepada Prof. Saldi Isra, enggak masalah. Gitu, lho.

Tentu kalau begitu ... apa ... orang lagi punya KPR, enggak bisa jadi calon kepala daerah, dong? Gitu, lho. Kredit Pemilikan Rumah. Ya? Itu harus correct, gitu ya, soal utang. Utang yang mana yang dipersyaratkan itu tidak boleh, ya. Harus ... bacanya harus yang teliti itu, Pasal 45 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016, ya? Undang Undang Pilkada.

Nah, yang kedua, ya. Pemohon yang Anda wakili ini ya, nomor berapa? Kan ada empat pasang calon, nomor berapa urutannya?

529. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [57:49]

Nomor Urut 1, Yang Mulia.

530. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [57:50]

Ya, di perolehan suara nomor berapa?

531. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [57:55]

Urutan ke-3, Yang Mulia.

532. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [57:57]

Urutan ke-3. Terus apa dosanya yang urutan ke-2 yang Pemohon tadi, sehingga harus dibatalkan juga perolehan suaranya?

533. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [58:05]

Sudah kami bacakan tadi (...)

534. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [58:06]

Apa? Apa coba, jelaskan lagi. Apa?

535. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [58:08]

Tentang syarat formilnya.

536. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [58:10]

Syarat formil utang tadi?

537. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [58:11]

Ya, utang tadi.

538. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [58:13]

Gitu, ya?

539. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [58:13]

Ya.

540. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [58:14]

Itu. Ya sudah, itu saja. Terima kasih.

541. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [58:16]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

542. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [58:17]

Ya.

543. KETUA: SALDI ISRA [58:19]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul.
Berikutnya, Kabupaten Bintan, Perkara Nomor 217.

544. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [58:28]

Mohon izin, Yang Mulia. Kami pindah di belakang, sama seperti yang tadi.

545. KETUA: SALDI ISRA [58:31]

Silakan.

Ada lagi yang mau ke depan? Oh, ya, silakan. Pokoknya selesailah, satu tugas itu. Silakan dulu, ini biar pindah dulu, penumpang pindah di jalan ini.

Silakan, silakan. Ini di Bintan ini ... apa namanya ... pilkada dengan kotak kosong, ya?

546. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [58:22]

Benar, Yang Mulia.

547. KETUA: SALDI ISRA [58:23]

Yang maju ini adalah Komunitas Bakti Bangsa untuk Provinsi Kepulauan Riau. Ini ... apa namanya ... ada sertifikasi, sertifikat sebagai pemantau?

548. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [58:37]

Ada, Yang Mulia.

549. KETUA: SALDI ISRA [58:38]

Di bukti (...)

550. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [58:38]

Saya selaku Kuasa Hukum, Yang Mulia.

551. KETUA: SALDI ISRA [58:40]

Ya, satu-satu dulu. Jadi lawyer itu harus sabar juga. Satu ditanya Hakim, satu dijawab, begitu.

552. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [58:46]

Baik, Yang Mulia.

553. KETUA: SALDI ISRA [58:47]

Itu Bukti P berapa? Bukti sertifikasi, sertifikat Anda itu?

554. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:00:00]

P-1, Yang Mulia.

555. KETUA: SALDI ISRA [01:00:01]

Bukti P-1. Ada KPU Bintan di sini? Ada sertifikatnya? Untuk Komunitas Bakti Bangsa Kabupaten Bintan ada, tapi kalau Kepulauan Riau, enggak ya?

556. TERMOHON: PEBRI PUJIYANTO [01:00:23]

Untuk sementara yang kami ... di Kepulauan Riau ada, Pak, terdaftar.

557. KETUA: SALDI ISRA [01:00:26]

Ya, yang terdaftar di Bintan itu yang mana?

558. TERMOHON: PEBRI PUJIYANTO [01:00:28]

Komunitas Bakti Bangsa, Kabupaten Bintan.

559. KETUA: SALDI ISRA [01:00:26]

Kabupaten Bintan, ya. Oke. Coba dilihat ... apa ... Bukti P-1 nya? Saudara sudah menyerahkan bukti fisiknya ke kami, belum?

560. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:01:00]

Izin, Yang Mulia. Untuk dokumen fisik belum kami serahkan, kemarin di tanggal 22 Desember kami ke sini.

561. KETUA: SALDI ISRA [01:01:07] [01:01:07]

Sekarang ada, enggak?

562. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:01:08]

Ada, Yang Mulia.

563. KETUA: SALDI ISRA [01:01:09]

Tolong diserahkan sekarang. Yang sertifikasinya saja dulu karena itu keabsahan dari pemantau ya, sertifikasi yang dari KPU. Ini terlalu banyak yang ... minta ke dia yang sertifikasinya saja, itu yang paling penting dulu.

KPU, coba ... apa ... betul ini yang dikeluarkan sertifikasinya? Mana KPU Bintang? Sini.

564. TERMOHON: PEBRI PUJIYANTO [01:02:51]

Ya.

565. KETUA: SALDI ISRA [01:02:52]

Maju ke sini. Betul ini Saudara keluarkan? Oke. Komunitas Bakti Bangsa, ya. Ini yang ... Haris Daulay siapa?

566. TERMOHON: PEBRI PUJIYANTO [01:03:18]

Ketua KPU.

567. KETUA: SALDI ISRA [01:03:19]

Oh, Ketua KPU. Ini yang dulu mensertifikatkan siapa? Atas nama siapa?

568. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:03:24]

Budi Prasetyo, Yang Mulia.

569. KETUA: SALDI ISRA [01:03:25]

Budi Prasetyo, betul.

570. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:03:27]

Untuk Bintang, Jerry, Yang Mulia.

571. KETUA: SALDI ISRA [01:03:28]

Siapa?

572. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:03:29]

Untuk yang di Bintang, Jerry.

573. KETUA: SALDI ISRA [01:03:32]

J?

574. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:03:33]

Jerry.

575. KETUA: SALDI ISRA [01:03:34]

Itu untuk menunjuk Anda sebagai Kuasa Hukum, ada?
Silakan kembali.

576. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:03:39]

Dari Jerry ke Budi Prasetyo, Yang Mulia.

577. KETUA: SALDI ISRA [01:03:42]

Ke Budi Prasetyo?

578. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:03:43]

Ya. Dari Budi Prasetyo (...)

579. KETUA: SALDI ISRA [01:03:44]

Budi Prasetyo siapa?

580. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:03:45]

Ketua KBB Provinsi Kepri.

581. KETUA: SALDI ISRA [01:03:48]

Mana apanya? Coba lihat ... apa namanya ... bukan ... apa namanya ... Surat Kuasa.

582. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:04:02]

Dari Budi ke kami, Yang Mulia.

583. KETUA: SALDI ISRA [01:04:02]

Bukan. Dari yang mendaftarkan itu Budi Prasetyo, bukan? Tidak, ya?

584. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:04:07]

Tidak.

585. KETUA: SALDI ISRA [01:04:08]

Jerry, kan?

586. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:04:10]

Jerry.

587. KETUA: SALDI ISRA [01:04:10]

Nah, Jerry ke Budi Prasetyo, Budi Prasetyo ke Anda. Karena kami tidak ingin ada kejadian lain yang mengurus ketika ... apa ... ketika pilkada dilaksanakan di daerah tertentu, lain lagi yang mendaftarkan perkara, dan itu harus klir dulu. Di sini ada Surat Kuasa yang bertanda tangan di bawah ini Budi Prasetyo. Oke. Selanjutnya disebut pemberi kuasa, dengan ini memberikan kuasa kepada Agung Ramadhan Saputra.

Siapa yang Agung Ramadhan Saputra?

588. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:04:52]

Saya, Yang Mulia.

589. KETUA: SALDI ISRA [01:04:53]

Oke. Yang Adiya Prama Rivaldi?

590. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADIYA PRAMA RIVALDI [01:04:56]

Izin, saya, Yang Mulia.

591. KETUA: SALDI ISRA [01:04:57]

Oke. Nah, sekarang karena yang mendaftarkan di Kabupaten Bintan bukan Budi Prasetyo. Nah, sekarang surat dari yang mendaftarkan ke Budi Prasetyo, ada enggak?

592. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:05:10]

Surat dari Jerry ke Budi Prasetyo... izin, Yang Mulia, ketinggalan, Yang Mulia.

593. KETUA: SALDI ISRA [01:05:18]

Ketinggalan, ada atau tidak?

594. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:05:19]

Ada, Yang Mulia, ada.

595. KETUA: SALDI ISRA [01:05:21]

Karena begini lho, kalau yang tidak di daerah, itu tidak bisa. Itu prinsip dasarnya. Makanya ini harus ada.

596. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:05:31]

Ada, Yang Mulia.

597. KETUA: SALDI ISRA [01:05:31]

Mana dia?

598. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:05:35]

Izin, Yang Mulia. Ketinggalan, Yang Mulia.

599. KETUA: SALDI ISRA [01:05:38]

Enggak mungkin ketinggalan, masa lawyer bisa ketinggalan Surat Kuasa kayak begitu?

600. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:05:42]

Ya karena memang Surat Kuasa itu kami persiapkan ... dipisahkan dengan berkas, Yang Mulia.

601. KETUA: SALDI ISRA [01:05:49]

Ndak, saya ini memang tidak advokat, Bung, tapi saya paham. Orang kalau akan memberikan apa saja, itu diawali dulu oleh adanya kuasa. Ini ada memang surat Budi Prasetyo kepada Saudara, ada? Tapi, oke, ya, itu catatan. Anda silakan sampaikan pokok-pokok Permohonannya.

602. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:06:10]

Baik, Yang Mulia.

603. KETUA: SALDI ISRA [01:06:13]

Yang sampai hari ini kami belum menerima bukti-bukti fisik Anda, ya? Sampai hari ini.

604. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:06:17]

Baik, Yang Mulia.

605. KETUA: SALDI ISRA [01:06:18]

Silakan.

606. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:06:17]

Izin, Yang Mulia.

607. KETUA: SALDI ISRA [01:06:20]

Silakan.

608. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:06:21]

Pertama-tama perkenalkan nama saya Agung Ramadhan Saputra selaku advokat dan yang kedua rekan saya Adiya Prama Rivaldi selaku aktivis. Kami menerima kuasa dari Budi Prasetyo dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komunitas Bakti Bangsa yang teregister di Provinsi Kepulauan Riau.

609. KETUA: SALDI ISRA [01:06:40]

Jadi, teregisternya tidak di Bintan, ya?

610. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:06:46]

Ya, Yang Mulia.

611. KETUA: SALDI ISRA [01:06:47]

Oke, ini harus klir, lho.

612. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:06:46]

Ya, Yang Mulia.

613. KETUA: SALDI ISRA [01:06:49]

Kami-kami Hakim ini harus fakta-fakta itu harus klir.

614. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:06:52]

Baik, Yang Mulia.

615. KETUA: SALDI ISRA [01:06:53]

Bahwa registernya itu harus di Bintan. Nah, itu yang boleh melakukan pengawasan di situ, artinya ... apa namanya ... pemantau terakreditasi itu, terakreditasi sesuai dengan levelnya.

616. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:07:05]

Baik, Yang Mulia.

617. KETUA: SALDI ISRA [01:07:05]

Oke, lanjut. Apa yang mau disampaikan lagi?

618. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:07:05]

Kepada Yang Terhormat, Yang Mulia Ketua Majelis Panel Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Izinkan kami untuk menyampaikan Permohonan yang akan kami singkat sebagai berikut.

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan.

619. KETUA: SALDI ISRA [01:07:30]

Ya, dianggap dibacakan. Terus.

620. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:07:33]

Kedua. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, dianggap dibacakan.

Selanjutnya, Kedudukan Hukum Pemohon, dianggap dibacakan.

621. KETUA: SALDI ISRA [01:07:51]

Ini berapa selisihnya? Perbedaan suaranya?

622. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:07:54]

Perbedaan suaranya sekitar 27.000 sekian, Yang Mulia.

623. KETUA: SALDI ISRA [01:07:51]

27.000. Yang Kosong?

624. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:08:02]

Kolom kosong itu 22.949[sic!], Yang Mulia.

625. KETUA: SALDI ISRA [01:08:05]

22.499[sic!]. Kalau yang ... apanya ... calon tunggalnya berapa?

626. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:08:11]

Calon tunggalnya 49.430 suara, Yang Mulia.

627. KETUA: SALDI ISRA [01:08:11]

49.430. Berarti ini sekitar 27.000 kurang sedikit, ya?

628. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:08:21]

Benar, Yang Mulia.

629. KETUA: SALDI ISRA [01:08:21]

Oke, silakan.

630. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:08:24]

Baik.

Pertama yang ingin kami sampaikan bahwa peristiwa yang terjadi di Kabupaten Bintan terdapat 126.000 DPT yang kemudian yang menggunakan hak pilihnya itu sekitar 75.000 sekian, Yang Mulia.

631. KETUA: SALDI ISRA [01:08:38]

Berapa persen itu?

632. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:08:40]

Itu sekitar 58% yang menggunakan hak pilihnya, Yang Mulia.

633. KETUA: SALDI ISRA [01:08:44]

Oke, 58%. Terus?

634. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:08:49]

Kemudian, pada tanggal 11 September 2024, Roby Kurniawan yang merupakan Paslon 01 membagikan sembako kepada warga Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Menteng, dan Kecamatan Bintan Pesisir.

635. KETUA: SALDI ISRA [01:09:03]

11 September itu sudah ditetapkan sebagai pasangan calon atau belum?

636. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:09:05]

Belum, Yang Mulia.

637. KETUA: SALDI ISRA [01:09:06]

Oke, lanjut.

638. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:09:10]

Bahwa menurut Ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada berikut perubahannya menyebutkan bahwa gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan calon terpilih.

Bahwa selanjutnya ditegaskan dalam ayat (5) pasal a quo, dalam hal gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali Kota

atau wakil wali kota selaku Petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.

639. KETUA: SALDI ISRA [01:09:57]

Oke, yang pasal-pasal, ketentuan-ketentuan enggak usah. Di mana Anda menjelaskan itu bentuk pelanggarannya?

640. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:10:06]

Bentuk pelanggarannya ada di (...)

641. KETUA: SALDI ISRA [01:10:07]

Bagaimana caranya? Ini tadi kan poinnya tuh, 11 September, Roby Kurniawan membagikan sembako kepada warga di Kecamatan Bintan, apa lagi?

642. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:10:18]

Kemudian juga ada pembagian bansos, baik itu uang santunan ataupun beras dan lain sebagainya, Yang Mulia.

643. KETUA: SALDI ISRA [01:10:25]

Itu kapan dilakukan, 11 September juga?

644. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:10:23]

Itu pada rentang waktu ... sem ... di bulan September, Yang Mulia.

645. KETUA: SALDI ISRA [01:10:31]

Oke, apa lagi?

646. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:10:32]

Kemudian, bahwa pada tanggal 20 Oktober 2024 telah diadakan Acara Ulang Tahun Partai Golkar yang diselenggarakan di Taman Relief Antam Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Dalam kegiatan itu dihadiri berbagai petinggi Partai Politik Golkar seperti, Calon Bupati Bintan, Roby Kurniawan, Dewi Kumalasari yang merupakan ibu kandungnya, Ketua DPRD Bintan M. Wahyu Nugraha, dan yang diawasi langsung oleh Panwaslu Kecamatan Bintan Timur, Bawaslu Kabupaten Bintan, dan Bawaslu Kepulauan Riau.

647. KETUA: SALDI ISRA [01:11:02]

Oke, jadi ini ada pertemuan tapi diawasi Bawaslu, ya?

648. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:11:07]

Benar, Yang Mulia.

649. KETUA: SALDI ISRA [01:11:07]

Apa lagi?

650. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:11:32]

Bahwa kegiatan a quo disertai dengan pemberian doorprize dan daftar tamu undangan dalam kegiatan HUT Golkar terdiri dari 60 ... yang ke-60 DPT[sic!] Partai Golkar Kabupaten Bintan sebagaimana tersebut pada surat permohonan izin keramaian dan permohonan bantuan pengamanan yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Bintan dengan salah satu undangan adalah masyarakat.

651. KETUA: SALDI ISRA [01:11:31]

Oke, jadi ada doorprize, ya?

652. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:11:33]

Benar, Yang Mulia.

653. KETUA: SALDI ISRA [01:11:34]

Lanjut apa lagi?

654. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:11:39]

Bahwa dalam kegiatan a quo terdapat juga pembagian doorprize kepada masyarakat, salah satu di antaranya doorprize tersebut berupa motor, Yang Mulia.

655. KETUA: SALDI ISRA [01:11:48]

Itu di halaman berapa, itu berupa motor itu.

656. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:11:51]

15, Yang Mulia.

657. KETUA: SALDI ISRA [01:11:52]

Halaman?

658. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:11:54]

15.

659. KETUA: SALDI ISRA [01:11:54]

Ini permohonan Anda halamannya tidak ada ini.

660. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:11:56]

Ya, Yang Mulia.

661. KETUA: SALDI ISRA [01:11:57]

Poin berapa yang Anda sebutkan tadi?

662. KETUA: SALDI ISRA [01:12:00]

Poin 15. Sebentar saya cek ini. Oh, a quo doorprize motor, ya?

663. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:12:08]

Ya.

664. KETUA: SALDI ISRA [01:12:09]

Sepeda Motor. Lalu bagaimana sepeda motor ini, siapa yang dapat?

665. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:12:13]

Yang dapat salah satu masyarakat, Yang Mulia.

666. KETUA: SALDI ISRA [01:12:15]

Oke, lanjut.

667. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:12:17]

Kemudian pada acara tersebut, disampaikan oleh MC bahwa oleh karena motor tersebut berasal dari gubernur, maka Paslon 01 atas Nama Roby Kurniawan yang kam i ingin menyerahkan kepada masyarakat.

668. KETUA: SALDI ISRA [01:12:32]

Oke, jadi (...)

669. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:12:33]

Itu sesuai bukti yang kami lampirkan, Yang Mulia.

670. KETUA: SALDI ISRA [01:12:35]

Jadi ini diberitahu oleh MC, Pasangan Calon 01, Roby Kurniawan yang menyerahkan, ya?

671. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:12:41]

Ya, Yang Mulia.

672. KETUA: SALDI ISRA [01:12:42]

Apa lagi?

673. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:12:42]

Perlu diketahui bahwa Gubernur atas nama Ansar Ahmad dan Roby Kurniawan adalah antara anak dan anak kandung, Yang Mulia.

674. KETUA: SALDI ISRA [01:12:51]

Oh, ya? Siapa yang anaknya?

675. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:12:52]

Anaknya Roby Kurniawan, Yang Mulia.

676. KETUA: SALDI ISRA [01:12:54]

Bapaknya yang gubernur itu?

677. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:12:54]

Paslon 01.
Gubernur. Petahanan, Yang Mulia.

678. KETUA: SALDI ISRA [01:12:56]

Oke. Terus? Apa lagi?

679. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:13:04]

Cukup, Yang Mulia.

680. KETUA: SALDI ISRA [01:13:05]

Cukup. Langsung Petitem, kalau begitu.

681. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:13:07]

Izin, Yang Mulia. Sebelum kami membacakan Petitem, izinkan saya menyampaikan suatu hal. Bahwa apa yang saya uraikan beberapa hal tadi, ada 3 poin yang menurut saya memang masuk dalam kualifikasi pelanggaran.

682. KETUA: SALDI ISRA [01:13:20]

Oke.

683. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:13:20]

Yang ditentukan dalam Undang-Undang Pilkada. Terdiri dari Pasal 71, 73, dan 76, dimana implikasi dalam pelanggaran itu adalah diskualifikasi.

684. KETUA: SALDI ISRA [01:13:29]

Oke.

685. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:13:30]

Bahwa sesuai dengan asas (...)

686. KETUA: SALDI ISRA [01:13:31]

Itu Anda ... Anda tuliskan tidak dalam Permohonan?

687. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:12:33]

Tidak, Yang Mulia.

688. KETUA: SALDI ISRA [01:13:34]

Nah, kalau tidak, enggak usah disampaikan.

689. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADIYA PRAMA RIVALDI [01:13:36]

Izin, Yang Mulia. Berkenaan ini ... karena ini berkenaan dengan ambang batas yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Pilkada.

690. KETUA: SALDI ISRA [01:13:41]

Ya, kan tadi sudah.

691. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:13:42]

Kami mohon agar kami diberikan kesempatan untuk meyakinkan bahwa perkara ini patut untuk lanjut ke pleno, Yang Mulia.

692. KETUA: SALDI ISRA [01:13:48]

Kalau enggak, ndak boleh, ndak diundang Anda datang ke sini.

693. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:13:51]

Baik, Yang Mulia.

694. KETUA: SALDI ISRA [01:13:52]

Jadi lawyer itu, mesti PD, lho. Dengan apa yang ditulis sendiri. Sampaikan Petitumnya.

695. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [01:14:00]

Izin dilanjutkan rekan Saya, Yang Mulia.

696. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADIYA PRAMA RIVALDI [01:14:02]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

697. KETUA: SALDI ISRA [01:14:03]

Silakan.

698. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADIYA PRAMA RIVALDI [01:14:04]

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bintan Nomor 622 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024, pukul 14.50 WIB dan/atau Keputusan KPU Kabupaten Bintan Nomor 398 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024. Keputusan KPU Kabupaten Bintan Nomor 400 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Nomor Urut ... Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan untuk melaksanakan pemungutan (...)

699. KETUA: SALDI ISRA [01:15:03]

Terus, poin 3 itu dibaca.

700. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADIYA PRAMA RIVALDI [01:15:06]

Izin, Yang Mulia. Poin (...)

701. KETUA: SALDI ISRA [01:15:08]

Ya, poin. Coba dibacakan poin 3.

702. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADIYA PRAMA RIVALDI [01:15:10]

Kami meminta untuk menghapusnya.

Menetapkan ... menetapkan membatalkan perolehan suara Hasil Calon Bupati (...)

703. KETUA: SALDI ISRA [01:15:17]

Menetapkan perolehan suara, jangan Anda tambah-tambah. Menetapkan perolehan suara, baca yang sesuai dengan tertulis.

704. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADIYA PRAMA RIVALDI [01:15:25]

Siap. Izin, Yang Mulia.

Menetapkan perolehan suara hasil Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupa ... Kabupaten Bintang Nomor 622 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintang Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut.

705. KETUA: SALDI ISRA [01:15:42]

Oke. 4.

706. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADIYA PRAMA RIVALDI [01:15:44]

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintang untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di seluruh TPS Kabupaten Bintang atau peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintang atas nama Roby Kurniawan, S.P.W.K. dan Deby Maryanti, A.Md. diskualifikasi karena telah melanggar tiap jenis aturan perundang-undangan seperti yang disebutkan di atas.
 - b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kabupaten Bintang atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintang mengulangi seluruh tahapan proses Pilkada Kabupaten Bintang di Tahun 2024 sampai dibukanya pendaftaran baru bagi calon peserta pilkada untuk Tahun 2025.

707. KETUA: SALDI ISRA [01:16:24]

Terus.

708. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADIYA PRAMA RIVALDI [01:16:24]

- c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintang untuk membatalkan Keputusan KPUD Kabupaten Bintang Nomor 398 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintang Tahun 2024 atau membatalkan Keputusan KPUD Kabupaten Bintang

Nomor 622 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024, pukul 14.50 WIB.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

709. KETUA: SALDI ISRA [01:17:01]

Terima kasih, cukup, ya?

710. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADIYA PRAMA RIVALDI [01:17:09]

Cukup, Yang Mulia.

711. KETUA: SALDI ISRA [01:17:01]

Ada yang mau disampaikan, Yang Mulia? Cukup.

Pak Arsul? Terima kasih.

Sekarang kita lanjut ke Kota Palopo, 168. Silakan.

712. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [01:17:21]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Kalinta & Co. Law Firm, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2024, dalam ini bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Farid Kasim dan Nurhaenih selaku Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Nomor Urut 2 pada Pilkada Kota Palopo Tahun 2024.

Dengan ini, mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 620 Tahun 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2024 yang diumumkan pada Tanggal 5 Desember 2024, pukul 03.49 WITA.

Kami lanjutkan ke Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pada bagian ini, izin kami membacakan tiga poin utama, Yang Mulia.

713. KETUA: SALDI ISRA [01:18:10]

Soal kewenangan tidak usah ya, lanjut saja.

714. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [01:18:12]

Mohon izin, Yang Mulia.

715. KETUA: SALDI ISRA [01:18:12]

Silakan.

716. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [01:18:13]

Karena kami tidak berbicara soal selisih suara, kami membacakan keadaan spesifik di Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

717. KETUA: SALDI ISRA [01:18:20]

Jadi gini, aturannya Kewenangan Mahkamah berwenang.

718. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [01:18:20]

Siap.

719. KETUA: SALDI ISRA [01:18:20]

Kemudian, Tenggang Waktu bagaimana.

720. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [01:18:20]

Siap.

721. KETUA: SALDI ISRA [01:18:29]

Kemudian nanti Legal standing. Nah, Legal Standing itu kalau melewati, ya baru diuraikan. Begitu urutan-urutannya.

722. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [01:18:35]

Betul, Yang Mulia.

723. KETUA: SALDI ISRA [01:18:36]

Ya.

724. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [01:18:38]

Nah oleh karenanya, Yang Mulia, terkait dengan kekewenangan, kami masukkan satu poin utama untuk menegaskan terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi pada (...)

725. KETUA: SALDI ISRA [01:18:39]

Jadi enggak berwenang Mahkamah menilainya?

726. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [01:18:40]

Ya, Yang Mulia?

727. KETUA: SALDI ISRA [01:18:40]

Enggak berwenang Mahkamah memeriksanya?

728. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [01:18:49]

Berwenang memeriksa (...)

729. KETUA: SALDI ISRA [01:18:50]

Tetapi mau menegaskan tadi.

730. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [01:18:50]

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

731. KETUA: SALDI ISRA [01:18:51]

Nah, silakan.

732. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [01:18:52]

Setelah kami (...)

733. KETUA: SALDI ISRA [01:18:53]

Poin berapa itu, halaman berapa?

734. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [01:18:54]

Di Poin j, halaman 5, Yang Mulia.

735. KETUA: SALDI ISRA [01:18:56]

Oke.

736. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [01:18:57]

Bahwa dalam perkara a quo Permohonan Pemohon menguraikan tidak terpenuhi syarat Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo, dengan Nomor Urut 4 disertai dengan keadaan spesifik sebagai berikut.

737. KETUA: SALDI ISRA [01:19:03]

Ya.

738. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [01:19:07]

Satu, adanya rekomendasi Bawaslu Kota Palopo yang menyatakan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo dengan Nomor Urut 4, seharusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat, tetapi tidak dilaksanakan oleh Termohon.

739. KETUA: SALDI ISRA [01:19:18]

Kenapa tidak memenuhi syarat itu?

740. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [01:19:20]

Terkait dengan ijazah palsu, Yang Mulia.

741. KETUA: SALDI ISRA [01:19:22]

Ijazah palsu, ya?

742. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [01:19:23]

Yang akan kami uraikan dalam Pokok Permohonan kami, Yang Mulia.

743. KETUA: SALDI ISRA [01:19:25]

Nah, ini kan Anda uraikan juga jadinya.

744. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [01:19:27]

Ini keadaan spesifik (...)

745. KETUA: SALDI ISRA [01:19:28]

Saya kira, kalau sudah disebut di sini enggak diuraikan lagi.

746. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [01:19:30]

Siap, Yang Mulia.

747. KETUA: SALDI ISRA [01:19:30]

Lanjut.

748. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [01:19:31]

Yang kedua, terkait Putusan Bawaslu Kota Palopo yang tidak dilaksanakan oleh Termohon.

Yang ketiga, terdapat perbedaan tafsir antara Termohon dan Bawaslu Kota Polopo, serta antara komisioner di dalam Termohon.

Yang keempat adalah Termohon sendiri yang awalnya menyatakan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Nomor Urut 4 Tidak Memenuhi Syarat atau TMS.

Yang kelima, pelanggaran terukur dan nyata.

Yang keenam, Calon Wali Kota Palopo Nomor Urut 4 dan 3 Komisioner Palopo pernah ditetapkan sebagai tersangka, namun karena alasan daluwarsa masa penanganan penyidikan, sehingga dicabut status tersangkanya.

Yang ketujuh, pelanggaran dinyatakan di semua tahapan.

Yang ke-8, upaya keberatan, laporan, dan temuan telah dilakukan.

Dan yang terakhir, perkara ini menjadi sorotan luas di Kota Palopo, maupun nasional.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pemohon, Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan.

749. KETUA: SALDI ISRA [01:20:24]

Oke. Tenggat Waktu bagaimana?

750. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [01:20:25]

Tenggat waktu. Terkait tenggat waktu terpenuhi, Yang Mulia. Tenggat Waktu terpenuhi. Bahwa (...)

751. KETUA: SALDI ISRA [01:20:27]

Oke. Kedudukan Hukum? Ini berapa ini selisih suara? Berapa pasangan calon di sini?

752. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL 01:20:33]

Di Kota Palopo ada 4 pasangan calon, Yang Mulia.

753. KETUA: SALDI ISRA [01:20:37]

4.

754. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [01:20:37]

Terkait dengan Kedudukan Hukum Pemohon, selisih (...)

755. KETUA: SALDI ISRA [01:20:39]

Sebentar dulu, sabar.

756. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [01:20:40]

Siap, Yang Mulia.

757. KETUA: SALDI ISRA [01:20:41]

Ini Anda kalau sudah pindah ke sini itu harus agak ... gitu.

758. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [01:20:46]

Baik, Yang Mulia.

759. KETUA: SALDI ISRA [01:20:48]

Peraih suara terbanyak berapa? Pasangan berapa?

760. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [01:20:51]

Peraih suara terbanyak Nomor Urut 4.

761. KETUA: SALDI ISRA [01:20:54]

Berapa suaranya?

762. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [01:20:56]

33.933 suara, Yang Mulia.

763. KETUA: SALDI ISRA [01:20:58]

Oke, 933[sic!] suara. Kalau yang peraih suara kedua, nomor urut berapa?

764. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [01:21:06]

Kami sebagai Pemohon, Yang Mulia, 33.338 suara, Yang Mulia.

765. KETUA: SALDI ISRA [01:21:11]

33.338. Jadi beda-beda tipis ini, ya?

766. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [01:21:12]

Perbedaannya 595, Yang Mulia.

767. KETUA: SALDI ISRA [01:21:20]

Oke, masuk ke rezim apa enggak?

768. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [01:21:23]

Berdasarkan ketentuan 158 ayat (2) memenuhi unsur, Yang Mulia. Karena ambang batas dalam 2% itu adalah 1.800 lebih, Yang Mulia.

769. KETUA: SALDI ISRA [01:21:32]

Oke, lanjut. Masuk ke Pokok Permohonan.

770. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [01:21:34]

Sehingga Kedudukan Hukum Pemohon memenuhi.
Untuk Pokok Permohonan dilanjutkan oleh rekan kami, Yang Mulia.

771. KETUA: SALDI ISRA [01:21:39]

Ya, silakan.

772. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [01:21:41]

Baik. Izin melanjutkan, Yang Mulia.

Pokok Permohonan. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya pelanggaran administrasi pemilihan, dimana Termohon juga tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo Nomor 071/PM/.02/02/K.SN-23/20/2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan beserta lampirannya tanggal 28 Oktober 2004, yaitu menyatakan status Calon Wali Kota Nomor Urut 4 atas nama Trisal Tahir dan Ahmad Syarifudin Daud tidak memenuhi syarat. Bukti terlampir, Yang Mulia.

773. KETUA: SALDI ISRA [01:22:32]

Oke.

774. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [01:22:32]

Bahwa sebelum kami mengurai terkait dengan stressing[sic] point kami terkait tidak dilaksanakan rekomendasi Bawaslu, Yang Mulia. Bahwa ada serangkaian peristiwa yang kami nilai itu krusial yang menunjukkan keadaan bahwa pelaksanaan Pemilukada di Palopo itu dilaksanakan secara tidak jujur dan adil sejak awal.

775. KETUA: SALDI ISRA [01:22:53]

Oke, apa itu?

776. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [01:22:53]

Baik, kami lanjut, Yang Mulia.

Bahwa pada saat pembukaan pendaftaran pasangan ... terkhusus Pasangan Calon Nomor 4 itu untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pemilihan dan Pasal 14 PKPU Nomor 8 terkait dengan berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau (...)

777. KETUA: SALDI ISRA [01:23:20]

Ini peraih suara terbanyaknya incumbent, bukan?

778. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [01:23:22]

Bukan, Yang Mulia.

779. KETUA: SALDI ISRA [01:23:23]

Bukan?

780. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [01:23:24]

Bukan.

781. KETUA: SALDI ISRA [01:23:25]

Incumbent tidak ikut lagi?

782. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [01:23:27]

Incumbent sudah tidak ikut.

783. KETUA: SALDI ISRA [01:23:27]

Oke. Jadi pertarungan bebas, ya?

784. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [01:23:29]

Pertarungan bebas.

785. KETUA: SALDI ISRA [01:23:30]

Oke, lanjut.

786. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [01:23:32]

Nah, sehingga Calon Wali Kota Nomor 4, Trisal Tahir ... Trisal Tahir maksudnya, menyerahkan dokumen berupa legalisir Ijazah Paket C dengan Nomor DN-01PC0002281. Bukti terlampir, Yang Mulia.

787. KETUA: SALDI ISRA [01:23:50]

Oke.

788. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [01:23:50]

Bahwa berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh Pasangan calon ... Calon Trisal Tahir tersebut, itu kemudian ada kerugian dari Pihak Termohon dengan melakukan penyuratan tanggal (...)

789. KETUA: SALDI ISRA [01:24:08]

Penyuratan ini apa ini? penyuratan itu apa maksudnya?

790. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [01:24:12]

Persuratan, Yang Mulia.

791. KETUA: SALDI ISRA [01:24:13]

Surat menyurat, ya.

792. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [01:24:14]

Ya, surat menyurat kepada dinas, kebetulan di ijazah yang dimasukkan itu lulus di PKBM Yusha (Yayasan Uswatun Hasana) di Jakarta Utara.

793. KETUA: SALDI ISRA [01:24:27]

Ya.

794. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [01:24:28]

Letak sekolah tersebut. Kemudian di masa perbaikan sebelum itu, Yang Mulia, masa perbaikan di tanggal 5 September, petugas penghubung Trisal Tahir itu menyerahkan dokumen perbaikan berupa Surat Keterangan Nomor 4739. Di halaman 10, Yang Mulia, kami tuliskan itu. Kemudian di tanggal 9 September melalui Surat Nomor 659 Tahun 2024, Termohon mengajukan surat menyurat kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara. Lalu, di tanggal 10 September 2024, ini kunjungan surat dan kunjungan langsung, Yang Mulia. Lalu kemudian dari suku dinas memberikan klarifikasi melalui Surat Nomor 5200 PK.01.05 yang pada poinnya adalah menyatakan

ijazah milik Trisal Tahir tidak terdaftar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara.

Nah oleh karena berdasarkan daripada dasar itu, di samping yang terkait dengan ijazah tersebut, Yang Mulia, kepala suku juga menerangkan bahwa surat keterangan suku dinas, Yang Mulia. Bahwa surat keterangan yang diajukan oleh Trisal Tahir yang membenarkan bahwa dia adalah siswa di PKBM Yusha itu kemudian dibantah pula oleh suku dinas yang bersangkutan, Suku Dinas Jakarta Utara, dengan pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan Surat Nomor 5215, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara membuktikan dokumen perbaikan yang diserahkan oleh Trisal Tahir, yaitu surat Keterangan dengan Nomor 4739/PK.00.24 dari Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Administrasi Jakarta Utara adalah tidak benar karena tidak diakui oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2.

Jadi surat perbaikan yang diajukan di tanggal 5 itu ternyata di ... per tanggal 10 tidak diakui oleh (...)

795. KETUA: SALDI ISRA [01:26:46]

Di bantah, ya.

796. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [01:26:46]

Oleh suku dinas. Baik.

797. KETUA: SALDI ISRA [01:26:47]

Apa lagi?

798. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [01:26:48]

Kami lanjut juga ada peristiwa tertanggal (...)

799. KETUA: SALDI ISRA [01:26:51]

Ini masih terkait dengan apa ini? Ijazah?

800. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [01:26:56]

Ya, Yang Mulia. Ini rangkaian peristiwa, Yang Mulia.

801. KETUA: SALDI ISRA [01:26:58]

Ya.

802. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [01:26:59]

Sebelum sampai pada terbitnya rekomendasi

803. KETUA: SALDI ISRA [01:27:00]

Oke.

804. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [01:27:01]

Yang kami anggap ini peristiwa krusial yang penting kami sampaikan.

805. KETUA: SALDI ISRA [01:27:04]

Ya.

806. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [01:27:05]

Lalu kemudian per tanggal 16 September, Yang Mulia, terdapat pengaduan ... tanggapan masyarakat, meminta kepada KPU untuk melakukan kembali klarifikasi kembali ya, kepada pihak sekolah. Lalu, kemudian di tanggal yang sama, Termohon itu merespons dengan mengeluarkan surat pendampingan, Surat Permohonan Pendampingan Nomor 684, bukti terlampir, Tahun 2024, untuk melakukan penelitian kembali atas keabsahan dokumen Calon Wali Kota Trisal Tahir pada tanggal 18 September, bertempat di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Maka, pada tanggal 18 September, masing-masing dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dan Kementerian Pendidikan, ada tiga surat, Yang Mulia, yang dikeluarkan untuk menjawab klarifikasi dari surat Termohon yang pada pokoknya menyatakan, Saudara Trisal Tahir berdasarkan database pada biodata dan lembar jawaban komputer yang bersangkutan, tidak terdaftar sebagai peserta Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Tahun 2016.

807. KETUA: SALDI ISRA [01:32:25]

Oke.

808. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [01:32:26]

Nah oleh karena atas dasar klari ... ya? Baik, Yang Mulia.

809. KETUA: SALDI ISRA [01:32:29]

Lanjut, lanjutkan. Silakan.

810. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [01:32:38]

Karena atas dasar klarifikasi inilah kemudian Termohon di tanggal 13 September, Yang Mulia, menerbitkan Surat Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Palopo Nomor 300/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon yang pada pokoknya adalah ... maaf, ada dua surat dan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 681 terkait tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon pada tanggal 13 September, yang pada intinya adalah Bakal Pasangan Calon Trisal Tahir dan Akhmad Syarifuddin tidak memenuhi syarat secara administrasi. Itu per tanggal 13, Yang Mulia.

811. KETUA: SALDI ISRA [01:33:18]

Itu karena faktor pendidikan?

812. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [01:33:21]

Ya. Karena hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Termohon, Yang Mulia.

813. KETUA: SALDI ISRA [01:33:23]

Sebentar. KPU Palopo, mana? KPU Palopo?

814. TERMOHON: HARY ZULFICAR [01:33:28]

Yang Mulia.

815. KETUA: SALDI ISRA [01:33:29]

Betul ada surat itu?

816. TERMOHON: HARY ZULFICAR [01:33:31]

Ada, Yang Mulia.

817. KETUA: SALDI ISRA [01:33:32]

Oke. Tanggal 13 itu karena soal pendidikan, ya?

818. TERMOHON: HARY ZULFICAR [01:33:34]

Siap, Yang Mulia.

819. KETUA: SALDI ISRA [01:33:35]

Oke.
Lanjut.

820. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [01:33:37]

Baik. Karena adanya surat TMS tersebut, maka Trisal Tahir mengajukan, Yang Mulia, sengketa administrasi di Bawaslu per tanggal 17 September, Yang Mulia.

821. KETUA: SALDI ISRA [01:33:48]

17 September?

822. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [01:33:49]

Ya, baik.

823. KETUA: SALDI ISRA [01:33:49]

Oke.

824. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [01:33:50]

Nah di tanggal 17, itu berlangsung selama kurang lebih 3 hari, itu dilakukan mediasi secara tertutup antara Termohon dengan Pihak Trisal Tahir yang pada pokoknya melahirkan keputusan di tanggal 21 (...)

825. KETUA: SALDI ISRA [01:34:07]

Oke.

826. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [01:33:08]

September, Yang Mulia. Nah yang kemudian dari atas putusan kesepakatan dari Bawaslu tersebut, itu dijadikan dasar oleh Pihak Termohon untuk mengubah status (...)

827. KETUA: SALDI ISRA [01:34:20]

Pertanyaan, isi kesepakatannya dulu apa yang tanggal 21 September (...)

828. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [01:35:23]

Baik, kami bacakan poin-poinnya, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan kesepakatan itu.

Yang pertama, berdasar amanah PKPU 10/2024, Perubahan atas PKPU 8/2024, Keputusan KP ... KPU Nomor 1229 dan Surat Ketua KPU Nomor 2070, maka ... dan Surat Ketua KPU Provinsi juga ada, Yang Mulia, Nomor 5096, maka Termohon akan melakukan klarifikasi kepada partai pengusul calon dan sekolah bersangkutan untuk dituangkan ke dalam Formulir Model BA.KLARIFIKASI.KWK.

Yang kedua, klarifikasi tersebut pada poin 1 di atas, akan dilaksanakan paling lambat 1x24 jam setelah kesepakatan ini dibuat.

Yang ketiga, hasil klarifikasi yang dimuat dalam Formulir BA.KLARIFIKASI akan ditindaklanjuti oleh Termohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang keempat, Pemohon atas nama Trisal Tahir bersedia membuat pernyataan terkait kebenaran ijazah yang dimiliki.

829. KETUA: SALDI ISRA [01:35:21]

Oke.

830. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [01:33:22]

Dan yang terakhir, Yang Mulia, para pihak bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan.

831. KETUA: SALDI ISRA [01:34:25]

Oke.

832. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [01:34:26]

Nah atas dasar inilah kemudian, Termohon pada tanggal 22 September mengubah status, mencabut Berita Acara Nomor 337 dengan menerbitkan Berita Acara Nomor 338.

833. KETUA: SALDI ISRA [01:34:41]

Oke, berhenti dulu.

834. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [01:34:42]

Yang merubah ... ya.

835. KETUA: SALDI ISRA [01:34:43]

Sebentar. KPU mana?

Apa dasar Anda mengubah itu? Karena ada jaminan bahwa itu asli dari ... apa? Dari pasangan ... dari siapa? Dari Trisal. Coba jelaskan. KPU, kenapa kemudian Anda yang pada awalnya mengatakan tidak, setelah ada mediasi, tiba-tiba akan mengklarifikasi kepada partai pengusul, lalu tanggal 22 itu mengubah apa yang sudah diputuskan sebelumnya? KPU.

836. TERMOHON: HARY ZULFICAR [01:28:14]

Karena kami memiliki pegangan juga, Yang Mulia, yaitu rekomendasi Bawaslu yang menyatakan untuk klarifikasi kepada pihak sekolah dengan pihak partai, dengan calon.

837. KETUA: SALDI ISRA [01:28:31]

Kan suruh klarifikasi, kan?

838. TERMOHON: HARY ZULFICAR [01:28:32]

Ya. Sudah, Yang Mulia.

839. KETUA: SALDI ISRA [01:28:33]

Tidak suruh menetapkan, kan?

840. TERMOHON: HARY ZULFICAR [01:28:35]

Ya.

841. KETUA: SALDI ISRA [01:28:36]

Bawaslu mana? Bawaslu ... apa ... Palopo. Itu Anda suruh menetapkan atau disuruh klarifikasi? Disuruh klarifikasi saja, ya? Hasil klarifikasinya disampaikan ndak ke Bawaslu? Apa hasil klarifikasinya? Pakai mik, pakai mik.

842. BAWASLU: KHAERANA [01:28:51]

Klarifikasinya pihak semula me (...)

843. KETUA: SALDI ISRA [01:28:53]

Pakai mik, pakai mik.

844. BAWASLU: KHAERANA [01:28:58]

Bersekolah di yayasan tersebut.

845. KETUA: SALDI ISRA [01:29:00]

Pihak sekolah?

846. BAWASLU: KHAERANA [01:29:01]

Mengakui.

847. KETUA: SALDI ISRA [01:29:02]

Ada enggak surat dari sekolah itu Anda punya? KPU?

848. TERMOHON: HARY ZULFICAR [01:29:08]

Enggak ada, Yang Mulia.

849. KETUA: SALDI ISRA [01:29:09]

Oke, lanjut.

850. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [01:29:11]

Baik, Yang Mulia.

Menyambung bahwa padahal dalam putusan Bawaslu tersebut, Yang Mulia, tidak ada satupun kesepakatan (...)

851. KETUA: SALDI ISRA [01:29:20]

Sudah (...)

852. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [01:29:21]

Dalam (...)

853. KETUA: SALDI ISRA [01:29:21]

Itu sudah dijelaskan tadi. Anda pindah ke isu lain lagi.

854. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [01:29:23]

Baik. Yang (...)

855. KETUA: SALDI ISRA [01:29:24]

Apa lagi isu lain.

856. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [01:29:24]

Yang berikutnya, Yang Mulia. Poin berikutnya, setelah dinyatakan (...)

857. KETUA: SALDI ISRA [01:29:29]

Sudah. Soal syarat sekolah selesai. Ada yang lain?

858. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [01:29:32]

Eenggak. Bukan, Yang Mulia.

859. KETUA: SALDI ISRA [01:29:32]

Ada yang lain yang mau dikatakan?

860. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [01:29:33]

Ini terkait dengan pidana pemilihan, Yang Mulia. Ada juga.

861. KETUA: SALDI ISRA [01:29:35]

Nah itu pidana pemilihan lainnya. Syarat itu selesai?

862. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [01:29:38]

Selesai, Yang Mulia.

863. KETUA: SALDI ISRA [01:29:39]

Nah, itu kan (...)

864. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [01:29:40]

Baik. Bahwa poin (...)

865. KETUA: SALDI ISRA [01:29:41]

Anda itu (...)

866. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [01:29:41]

Terkait dengan syarat itu, kami ... baik, Yang Mulia.

867. KETUA: SALDI ISRA [01:29:44]

Tenang-tenang.

868. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [01:29:45]

Baik.

869. KETUA: SALDI ISRA [01:29:45]

Satu-satu dulu.

870. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [01:29:46]

Baik.

871. KETUA: SALDI ISRA [01:29:46]

Satu selesai, nah lanjut ke poin berikutnya.

872. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [01:29:48]

Baik, Yang Mulia.

873. KETUA: SALDI ISRA [01:29:49]

Pidana pemilu, bagaimana?

874. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [01:29:51]

Kalau terkait dengan pidana pemilu, Yang Mulia. Di tanggal 28 Oktober, dimulai adanya laporan masyarakat, Yang Mulia. Yang dilapor itu adalah komisioner KPU, ada 3 komisioner dan 1 orang calon ... pasangan calon tidak (...)

875. KETUA: SALDI ISRA [01:30:05]

Ya.

876. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [01:30:05]

Atas nama (ucapan tidak terdengar jelas).

Nah, berjalan waktu kemudian diproses oleh Gakkumdu, maka di tanggal ... mohon maaf, Yang Mulia, kami lihat dulu Permohonan agar lebih jelas. Jadi, di tanggal 17 Oktober, Yang Mulia, Kepolisian Resort Kota Palopo menetapkan Calon Wali Kota Trisal Tahir dan 3 Komisioner KPU Kota Palopo sebagai tersangka dalam tindak pidana pemilihan umum.

877. KETUA: SALDI ISRA [01:30:31]

Sampai sekarang (...)

878. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [01:30:31]

Pemilihan (...)

879. KETUA: SALDI ISRA [01:30:31]

Bagaimana perkembangannya?

880. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [01:30:32]

Belum, Yang Mulia. Karena dengan alasan formil, 14 hari, di ... para tersangka dipanggil untuk dilakukan ... diambil Berita Acara keterangannya sampai pada batas waktu 14 hari tidak menghadiri, Yang Mulia.

881. KETUA: SALDI ISRA [01:30:46]

Tidak datang?

882. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [01:30:46]

Tidak datang. Sehingga (...)

883. KETUA: SALDI ISRA [01:30:47]

Lalu, perkara itu di-drop?

884. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [01:30:49]

Ya, Yang Mulia.

885. KETUA: SALDI ISRA [01:30:50]

Oke.

886. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [01:30:51]

Dicabut (...)

887. KETUA: SALDI ISRA [01:30:51]

Betul begitu, KPU?

888. TERMOHON: HARY ZULFICAR [01:30:54]

Siap, Yang Mulia.

889. KETUA: SALDI ISRA [01:30:55]

Ya, ya. Jadi, Anda dipanggil polisi enggak datang-datang?

890. TERMOHON: HARY ZULFICAR [01:30:58]

Mohon izin, Yang Mulia. 3 orang, saya tidak masuk dalam (...)

891. KETUA: SALDI ISRA [01:31:01]

Oke yang 3 orang itu datang atau tidak?

892. TERMOHON: HARY ZULFICAR [01:31:03]

Tidak, Yang Mulia.

893. KETUA: SALDI ISRA [01:31:04]

Oh, tidak datang. Oke, lanjut.

894. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [01:31:06]

Baik, Yang Mulia. Sampai di situ, Yang Mulia.

895. KETUA: SALDI ISRA [01:31:08]

Ya, kalau begitu (...)

896. KUASA HUKUM PEMOHON 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [01:31:09]

Kemudian (...)

897. KETUA: SALDI ISRA [01:31:09]

Anda lanjut ke Petitum.

898. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [01:31:11]

Baik, Yang Mulia.

Terkait dengan rekomendasi dulu, Yang Mulia. Kami ingin menyampaikan (...)

899. KETUA: SALDI ISRA [01:31:16]

Ya.

900. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [01:31:16]

Bahwa ada rekomendasi, Yang Mulia, yang tidak dilaksanakan dengan berdasar Pasal 133.

901. KETUA: SALDI ISRA [01:31:20]

Rekomendasi soal apa yang tidak dilaksanakan?

902. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [01:31:23]

Yaitu pelanggaran administrasi pemilihan yang seharusnya menurut temuan dan kajian daripada Bawaslu, seharusnya pasangan

Calon Trisal Tahir dan Akhmad Syarifuddin ini dinyatakan tidak memiliki syarat atau didiskualifikasi dalam kepesertaan, Yang Mulia.

903. KETUA: SALDI ISRA [01:31:40]

Oke.

904. KUASA HUKUM PEMOHON 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [01:31:41]

Nah, dari itu kemudian di ... Termohon tidak menindaklanjutinya dengan berdasar pada Pasal 133 PKPU 8, Yang Mulia. Nah, hal itulah yang kemudian ingin kami berikan tanggapan, Yang Mulia.

905. KETUA: SALDI ISRA [01:31:56]

Jangan tanggapi di sini.

906. KUASA HUKUM PEMOHON 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [01:31:57]

Terhadap ... baik.

907. KETUA: SALDI ISRA [01:31:58]

Sudah, jangan tanggapi di sini.

908. KUASA HUKUM PEMOHON 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [01:31:59]

Baik.

909. KETUA: SALDI ISRA [01:31:59]

Sudah. Nanti kita ... itu pekerjaan Hakim, jangan Anda ambil itu.

910. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [01:36:01]

Baik, Yang Mulia. Nah (...)

911. KETUA: SALDI ISRA [01:36:02]

Langsung ke Petitem sekarang.

912. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [01:36:02]

Itulah stressing point-nya, Yang Mulia. Bahwa rekomendasi itu tidak dilaksanakan (...)

913. KETUA: SALDI ISRA [01:36:07]

Ya, sudah.

914. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM

Ya, baik.

915. KETUA: SALDI ISRA [01:36:08]

Langsung ke Petitem.

916. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [01:36:09]

Baik, dilanjutkan oleh rekan saya, Yang Mulia.

917. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [01:36:12]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Izin, satu poin sebelum melanjutkan ke Petitem. Bahwa yang disampaikan Ketua Bawaslu tadi juga sudah kami sampaikan dalam dalil.

918. KETUA: SALDI ISRA [01:36:19]

Ya.

919. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [01:36:20]

Terkait hasil klarifikasi bahkan pihak sekolah tidak mengakui.

920. KETUA: SALDI ISRA [01:36:23]

Sudah, jangan diulang-ulang. Aduh.

921. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [01:36:25]

Menegaskan saja, Yang Mulia.

922. KETUA: SALDI ISRA [01:36:26]

Anda kalau begini-begini, bisa saya suruh keluar ruangan ini.

923. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [01:36:31]

Siap, Yang Mulia.

Petitum. Poin 5, Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024, pukul 03.49 WITA.
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Trisal Tahir dan Dr. Ahmad Syarifuddin, S.E., M.Si., selaku Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2024.
4. Membatalkan Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 339 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 340 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, sepanjang berkaitan dengan penetapan pasangan calon peserta dan penetapan Nomor Urut 4 atas nama Trisal Tahir dan Dr. Ahmad Syarifuddin, S.E., M.Si.
5. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024, pukul 03.49 WITA yang benar

menurut Pemohon adalah sebagai berikut. Izin membacakan tabel, Yang Mulia.

924. KETUA: SALDI ISRA [01:38:20]

Dianggap dibacakan saja.

925. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [01:38:21]

Dianggap dibacakan.

926. KETUA: SALDI ISRA [01:38:21]

Ya.

927. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [01:38:22]

Atau setidaknya-tidaknya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2024 yang diikuti oleh pasangan calon sebagai berikut.

Nomor Urut 1, Putri Dakka dan ... S.H., dan Drs. Haidir Basir.

Nomor Urut 2, Dr. H. Farid Kasim dan Dr. Hj. Nurhaenih.

Nomor Urut 3, Ir. H. Rahmat Masri Bondaso, M.Si., dan Hj. Andi Tenri Karta.

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon Kalinta & Co Law Firm.
Terima kasih, Yang Mulia.

928. KETUA: SALDI ISRA [01:39:06]

Terima kasih.

Pak Arsul, cukup? Pak Ridwan? Silakan.

929. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:39:14]

Sedikit saja. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.
Saudara Kuasa Pemohon, ya?

930. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [01:39:17]

Siap, Yang Mulia.

931. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:39:18]

Nah, ini memang berkaitan dengan syarat sebagai calon ini, ya. Mengenai pendidikan. Memang menjadi syarat yang penting untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi kepala daerah itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf c dan juga dari Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2024 itu memang mensyaratkan di situ. Tetapi ketika ... dan banyak sekali akhir-akhir ini, ada perkembangannya bahwa di PHPKada kali ini banyak sekali yang berkaitan dengan syarat pendidikan ini, ijazah ini yang menjadi dalil, selain dari syarat ... eh, apa ... Petitum juga yang banyak sekali didiktumnya[sic!] itu alternatif gitu ya dan kumulatif, tapi itu harus dengan bukti.

932. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [01:40:15]

Siap, Yang Mulia.

933. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:40:17]

Ya. Nah, Saya lihat di sini, saya lihat dari Permohonannya ini belum, belum tergambar, mudah-mudahan ... bukti-bukti itu. Karena memang siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan.

934. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [01:40:25]

Siap, Yang Mulia.

935. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:40:25]

Walaupun di dalam persidangan ini, ini perkara konkret, artinya Saudara yang mendalilkan itu bisa mendapatkan juga advantage ya, keuntungan juga dari keterangan yang akan diberikan oleh KPU, oleh Bawaslu, oleh Pihak Terkait (...)

936. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [01:40:41]

Baik, Yang Mulia.

937. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:40:41]

Tapi memang harus secara jelas.

938. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [01:40:41]

Baik, Yang Mulia.

939. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:40:41]

Dibawa itu, jangan hanya di ... apa namaya ... diuraikan saja, tetapi tadi tidak melengkapinya. Jadi, supaya lebih mudah terus terang benderang nanti itu diadu antara apa yang Saudara dalilkan itu dengan bukti yang Saudara hadirkan dan juga akan di ... Saya belum melihatnya ini. Untuk yang lain juga mungkin penting bahwa bukti-bukti itu betul-betul disiapkan. Bukan hanya dengan sekadar keterangan, tetapi dengan nyata itu terlihat. Karena ini speedy trial yang juga kita harus cepat, tapi juga Saudara ini harus taktis menyiapkan segala sesuatunya itu.

940. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: WAHYUDI KASRUL [01:41:25]

Siap, Yang Mulia.

941. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:41:27]

Ya, terima kasih.

942. KETUA: SALDI ISRA [01:41:25]

Terima kasih, Yang Mulia.
Terakhir di sesi ini, Perkara Nomor 224 Kabupaten Mahakam Ulu.
Silakan.

943. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:41:39]

Baik, Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Panel.

Perkenankan, kami bertindak atas nama Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Pilkada Kabupaten Mahakam Ulu atas nama Novita Bulan dan Artya Fathra Martin.

Mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 601 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan dan seterusnya, tanggal 6 Desember 2024.

Kemudian mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kami menyampaikan bahwa Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan ini yang selengkapnya mohon dianggap dibacakan.

Kemudian mengenai Tenggang Waktu, Yang Mulia. Karena objek ini ditetapkan tanggal 6 Desember, Jumat, kemudian Permohonan kami ajukan di hari Selasa, sehingga memenuhi di Tenggang Waktu dan perbaikan juga masih memenuhi di Tenggang Waktu karena disampaikan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024.

Selanjutnya yang ketiga, mengenai Kedudukan Hukum, Yang Mulia. Memang selisih antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor urut 3 selaku peraih suara terbanyak itu sebanyak 1.611, sementara ambang batas hanya 442 suara, dengan jumlah suara sah hanya 22.099 suara.

Namun demikian, Yang Mulia. Karena menurut Pemohon, pemberlakuan ambang batas terhadap hasil pemilihan di Kabupaten Mahakam Ulu secara spesifik dan kasuistis beralasan untuk ditunda atau setidaknya dipertimbangkan bersama-sama dengan Pokok Permohonan oleh karena ada kondisi spesifik terjadinya pelanggaran serius, bagaimana kami uraikan di halaman 5 Permohonan dalam kontestasi pilkada yang tidak fair dan timpang antarpasangan calon. Kenapa? Karena sebab utama anak kandung dari bupati aktif, bupati aktif ini atas nama Bapak Dr. Bonifasius Belawan Geh, yakni yang bernama ... anaknya yang bernama Owena Mayang Shari Belawan sebagai Calon Bupati Nomor Urut 3. Hal mana dengan keikutsertaan anaknya, bupati aktif bertindak[sic!] menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan untuk mesin pemenangan pasangan calon anaknya sampai akhirnya, Yang Mulia, ditetapkan menjadi tersangka oleh Gakkumdu, dan juga pelanggaran-pelanggaran lain yang dilakukan yang akan kami sampaikan (...)

944. KETUA: SALDI ISRA [01:44:14]

Yang jadi tersangka itu, siapa? Pak Heru?

945. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:44:16]

Ya, Yang Mulia.

946. KETUA: SALDI ISRA [01:44:17]

Yang ditetapkan tersangka oleh Gakkumdu itu siapa?

947. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:44:19]

Yang ditetapkan tersangka adalah bupati aktifnya.

948. KETUA: SALDI ISRA [01:44:22]

Oke.

949. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:44:22]

Kemudian anaknya yang calon bupati, kemudian calon wakil bupati, kemudian juga dua orang kepala desa. Nanti kami uraikan di dalam Pokok Permohonan.

Sehingga, Yang Mulia, kami singkat yang mengenai Kedudukan Hukum.

950. KETUA: SALDI ISRA [01:44:40]

Ya.

951. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:44:40]

Langsung ke halaman 8, ya. Mohon maaf.

952. KETUA: SALDI ISRA [01:44:48]

Silakan, lanjut.

953. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:44:49]

Sehingga, demi mengedepankan keadilan substantif, Pemohon berharap dan memohon sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menimbang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi secara terang-terangan dan kasat mata yang melibatkan bupati aktif ini yang berakibat secara signifikan mempengaruhi keterpilihan pasangan calon sebagai bagian dari Perkara Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Mahakam Ulu.

Selanjutnya, mohon izin. Kami langsung masuk ke Pokok Permohonan di halaman 10, Yang Mulia.

Niat untuk menggunakan kewenangan program serta kegiatan Kedinasan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu untuk pemenangan anaknya telah disusun oleh bupati aktif secara matang atau terencana, hal mana bupati aktif memanfaatkan momen kedinasan melalui undangan Bimtek PUMK Kabupaten Mahakam Ulu di Yogyakarta, tanggal 29 Juli 2024 dengan mengundang SKPD dan juga melibatkan petinggi kampung, ketua badan permusyawaratan kampung, pengurus badan usaha milik kampung yang masing-masing terdiri ada 3 orang, Kemudian pengawas BUMK dan kemudian kasir dengan syarat bisa administrasi keuangan dan kontemporer. Hal ini kami buktikan dengan Bukti P-35 dan juga P-36.

Di Bukti P-36, ada juga rekaman dari bupati, ketika dalam Bimtek tersebut memberikan arahan dan sikapnya kepada seluruh peserta yang hadir untuk mendukung anak kandungnya maju sebagai Calon Bupati Mahakam Ulu.

Kemudian, Yang Mulia. Lanjut ke peristiwa di 28 Agustus.

Dalil poin 2.3, dimana dalam deklarasi, bupati aktif itu ikut hadir menghadiri ... deklarasi anak kandungnya menjadi calon pasangan ... bakal pasangan calon.

Selanjutnya, Yang Mulia. Ketika sudah ada penetapan pasangan calon ya, bupati aktif juga memfasilitasi pada 14 Oktober 2024, memfasilitasi kegiatan pemberian sapi. Dimana kami buktikan dengan P-41 dan ... dan P-42.

Selanjutnya, Yang Mulia. Ada satu hal yang menarik yang menurut kami ada ... bel ... belum menjadi stressing[sic!] pada poin 2.5 di halaman 11. Ketika Polres Mahakam Ulu di tanggal 18 Oktober 2024, menerbitkan surat tanda terima pemberitahuan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3, pasangan calon anak Pak Bupati ini, kemudian mene ... menerbitkan surat tanda pemberitahuan kampanye berisi tentang Informasi Agenda Kampanye Pasangan Nomor 03 yang akan dilangsungkan pada Kamis, 24 Oktober, pukul 11.00 sampai 15.00 WITA di Ladang Umum, Kampung Long Gelawang, Kecamatan Laham, dimana kampanye ini adalah kampanye berupa pertemuan terbatas dengan materi kampanye ialah penyampaian misi dan visi. Namun, Yang Mulia, sehari sebelum jadwal kampanye pada tanggal 23 Oktober 2024, tadi kampanyenya adalah 24 Oktober, tanggal 23 Oktober diterbitkan undangan berupa Kegiatan Tanam Padi Lahan Kering 10 hektare oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melalui Sekretariat Daerah dengan Surat Undangan Nomor 400 dan seterusnya, kami sampaikan dalam Bukti P-37. Dimana Kegiatan Tanam Padi Lahan Kering 10 hektare itu tempatnya bersamaan atau bersebelahan dengan kegiatan kampanye yang tadi sudah ditetapkan izinnya melalui Kapolres. Dan di situ yang hadir adalah pejabat-pejabat yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.

Kemudian, Yang Mulia, kampanye ... kegiatan Tanam Padi itu dihadiri oleh Bupati Mahakam Ulu beserta 40 undangan lainnya yang tersebut dalam surat undangan.

Nah yang menarik, Yang Mulia, di dalam kampanye ... di dalam kegiatan tanam padi tersebut, terdapat bukti-bukti kegiatan kampanye berupa adanya foto-foto alat peraga kampanye, kemudian baliho, spanduk, dan umbul-umbul, serta masyarakat yang hadir di dalam kegiatan tanam padi tersebut mengenakan baju bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 3. Kami buktikan di P-39 dan P-40.

Terhadap kegiatan tersebut, Tim Pemenangan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 2 membuat laporan kepada Bawaslu dengan laporan di tanggal ... di hari yang sama, kami sampaikan dalam Bukti P-14 dan P-15.

Kemudian, Yang Mulia. Di Poin b ... Poin 2.9 di halaman 12. Bawaslu menindaklanjuti ... melakukan klarifikasi, melakukan pemeriksaan kepada pelapor dan saksi-saksi, dan juga kepada terlapor. Dimana ada 5 orang yang dilaporkan, yakni bupati aktif Saudara Bonifasius Belawan Geh, mohon izin, namanya enggak kami ... gelarnya enggak kami sebutkan. Kemudian yang kedua, Owena Mayang Shari, Stanislaus Liah (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3), Paulus Paran Hilah (Petinggi Kampung atau Kepala Desa Long Gelawang), kemudian Saudara Ding, Petinggi Kampung Datah Bilang Ilir. Ini kami sampaikan dalam Bukti P-14, P-15, P-16, dan dalam Bukti P-17 Gakkumdu dalam hal ini adalah Kepolisian Kapol ... Resort Mahakam Ulu menyatakan bahwa laporan dinyatakan sebagai tindak pidana pemilihan.

Kemudian dengan ... dari hasil pemeriksaan sebagaimana kami sampaikan dalam Bukti P-18 dan P-19, kelima terlapor ditetapkan sebagai tersangka.

Dan akan tetapi, Yang Mulia, sebagaimana juga terjadi di sebelumnya, tidak dapat ditindaklanjuti karena beberapa ... setelah tiga kali dipanggil, kelima tersangka itu tidak pernah hadir ke kepolisian, sehingga proses penyidikan tersebut dihentikan. Namun, kemudian sampai dengan atas penghentian dengan alasan kedaluwarsa, Yang Mulia. Atas penghentian tersebut, Pemohon melalui Kuasa Hukum yang lain mengajukan praperadilan dan saat ini sidang praperadilan masih berlangsung, Yang mulia.

Selanjutnya, Yang Mulia. Pelanggaran lainnya selain penggunaan kekuasaan tadi, berupa pelanggaran yang secara prinsip membuat ... berupa tindakan membuat kontrak politik antara Pasangan Calon Nomor 3 dengan para ketua RT di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu.

954. KETUA: SALDI ISRA [01:52:12]

Itu poin berapa, itu?

955. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:52:13]

Poin 3, halaman 14, Yang Mulia.

956. KETUA: SALDI ISRA [01:52:15]

Oke.

957. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:52:16]

Sebagaimana kami buktikan di ... dengan Bukti P-5 sampai dengan P-13, kemudian P-43 dan P-44.

958. KETUA: SALDI ISRA [01:52:26]

Kontrak politik itu isinya apa? Ada, ya?

959. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:52:27]

Baik.

960. KETUA: SALDI ISRA [01:52:28]

Di situ, ya? Oke.

961. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:52:28]

Ada, Yang Mulia.

962. KETUA: SALDI ISRA [01:52:28]

Oke. Lanjut.

963. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:52:28]

Jadi sedikit kami sampaikan di dalam kontrak politik itu di Pasal 3, di Bukti P-6, kami ambil satu sampel, P-6.

964. KETUA: SALDI ISRA [01:52:38]

Ya.

965. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:52:39]

Disebutkan Pasal 3, jika terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, pihak kedua, pihak kedua adalah Owena Mayang (Calon Bupati Nomor 3) akan mengalokasikan anggaran dana dalam bentuk program alokasi dana kampung sebesar minimal Rp4 Miliar hingga Rp8 Miliar per kampung per tahun. Program ketahanan keluarga sebesar minimal Rp5.000.000,00 hingga Rp10.000.000,00 per dasawisma, per tahun. Dan program dana RT=Rp200.000.000,00 hingga Rp300.000.000,00 per tahun.

Kemudian di Pasal 6, Yang Mulia, pihak pertama dalam hal ini adalah ketua RT, kalau di P-6 kami ambil sampel ketua RT 03, nama Soehemilius Soebem[sic!], RT 3 Kelurahan Batu Majang, Kecamatan Long Bagun.

Pihak pertama, atau kepala ... ketua RT dapat mensosialisasikan kontrak politik ini kepada warga RT dan kampung setempat.

966. KETUA: SALDI ISRA [01:53:36]

Terus.

967. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:53:37]

Baik, sebentar, Yang Mulia.

968. KETUA: SALDI ISRA [01:53:38]

Waktunya tinggal 2 menit, Pak Heru.

969. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:53:40]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin.

Kami lanjutkan, Yang Mulia, di poin 4. Uraian kronologis tersebut di atas menunjukkan secara kasat mata bahwa benar terbukti telah terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Mahakam Ulu yang melibatkan Bupati Mahakam aktif untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor 3 yang merupakan anak kandungnya dengan melibatkan sekda dan jajaran SKPD, setidaknya untuk mendukung kemenangan anaknya yang jelas-jelas menguntungkan pasangan Calon Nomor 3 dan merugikan Pemohon serta pasangan calon lain yang

berujung ditetapkannya Bupati Mahakam Ulu aktif dan anaknya beserta calon wakil dan dua orang kepala desa sebagai tersangka adalah pelanggaran yang nyata-nyata menciderai dan mencoreng demokrasi dalam Pilkada Kabupaten Mahakam Ulu.

Harapan Pemohon, Yang Mulia, semoga atas pelanggaran-pelanggaran tersebut, Mahkamah berkenan mempertimbangkannya sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71[sic!] ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang 10/2016.

970. KETUA: SALDI ISRA [01:54:42]

Oke. Lanjut Petitem.

971. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:54:45]

Ya. Baik, Yang Mulia.

Petitem. Di halaman 16 yang per ... angka satu.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 601 dan seterusnya tentang Penetapan Hasil Pemilihan dan seterusnya tertanggal 6 Desember 2024.
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan seterusnya yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 363[sic!] Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu ... Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 22 September 2024 dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024.
4. Menyatakan batal Keputusan Termohon Nomor 363 tentang Penetapan Pasangan Calon sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 3.
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Atau setidaknya-tidaknya, Yang Mulia, menyatakan batal Keputusan Termohon Nomor 601 tentang Penetapan Hasil tertanggal ... Hasil Pemilihan dan seterusnya tertanggal 6 Desember 2024.

Dan yang ketujuh, memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh ... di TPS seluruh wilayah Kabupaten Mahakam Ulu.

Atau setidaknya-tidaknya.

Alternatif yang ketiga, Yang Mulia.

Menyatakan batal Keputusan Termohon Nomor 601, tanggal 6 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Sepanjang Perolehan Suara Pasangan Calon di Kecamatan Laham, Kecamatan Long Bagun, dan Kecamatan Long Pahangai.

Memerintah Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di tiga ... di seluruh TPS di wilayah 3 kecamatan sebagaimana kami sebutkan di Petitum ke-8.

Yang terakhir, memerintahkan kepada KPU Kabupaten Mahakam Ulu untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

972. KETUA: SALDI ISRA [01:57:03]

Terima kasih.

Pak Heru, itu alternatif yang 6, 7 itu alternatif untuk nomor berapa?

973. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:57:07]

Baik, Yang Mulia. Kami sudah uraikan tadi karena (...)

974. KETUA: SALDI ISRA [01:57:13]

Ya.

975. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:57:13]

Diminta langsung ke Petitum. Jadi sebelum penutup, kami sampaikan alternatif yang 6 ke 7, jadi kami uraikan di Posita di halaman 18, Yang Mulia.

976. KETUA: SALDI ISRA [01:57:28]

Terus, kalau yang 8, 9?

977. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:57:35]

Oh, maaf. 6, 7, Yang Mulia (...)

978. KETUA: SALDI ISRA [01:57:37]

Ya.

979. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:57:37]

Kalau yang 8, 9, kami sampaikan di Posita angka 12, halaman 16. Kemudian kalau yang 6, 7, sekiranya kami di posita ... sam ... 1 sam ... eh, 2 sampai 5, kami mohon Mahkamah progresif (ucapan tidak terdengar jelas) Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5), namun, dalam hal Mahkamah tidak sependapat, kami mohon agar dilakukan pemungutan suara ulang dengan diikuti oleh ... diikuti seluruh pasangan calon, dalam Petitum ke 6 dan ke 7, Yang Mulia.

980. KETUA: SALDI ISRA [01:58:10]

Oke, terima kasih.
Ada yang mau disampaikan, Yang Mulia Pak Ridwan? Cukup.
Yang Mulia, Pak Arsul, Silakan.

981. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:58:21]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel.
Mohon izin mendalami Pak Heru, keliatannya kalau musim sengketa pemilu, Pak Heru ini wajahnya lebih berseri-seri.

982. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:58:37]

Terima kasih, Yang Mulia.

983. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:58:41]

Saya katakan demikian karena dulu waktu Pilpres 2019, saya yang minta Pak Heru jadi saksi ahli untuk Paslon 01, begitu, ya.
Ya. Begini, Pak Heru. Di halaman 14, poin 2.19, itu kan dikatakan bahwa atas SP3 yang dilakukan kemudian diajukan praperadilan. Ini hasilnya apa, Pak Heru?

984. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:59:10]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Sampai dengan hari ini, kalau tidak salah hari ini adalah sidang terakhir praperadilan, sidang berlangsung.

985. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:59:21]

Sidang berlangsung, ya?

986. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:59:22]

Ya, Yang Mulia.

987. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:59:22]

Oke. baik, ya.

Nah, saya menegaskan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Panel, ya. Ini kan alternatifnya tidak hanya 1, tapi di bawahnya juga ada lagi. Itu yang untuk angka 9 ya, yang memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang ini diikuti oleh semua pasangan calon, sama seperti yang tadi di atasnya dijelaskan atau gimana?

988. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:59:58]

Baik, Yang Mulia.

Jadi karena di dalam Petitum yang ke-8, kami tidak meminta diskualifikasi.

989. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:00:06]

Ya.

990. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [02:00:06]

Sebagai alternatif.

991. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:00:07]

Ya.

992. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [02:00:07]

Maka, semua pasangan calon ikut. Nah, begitu.

993. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:00:10]

Begitu, ya?

994. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [02:00:10]

Kemudian yang berikutnya, kenapa kami meminta di 3 kecamatan?

995. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:00:14]

He em.

996. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [02:00:15]

Karena pertama, kampanye yang kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan tersangka dan pemberian sapi itu terjadi di dap ... 1 dapil, 2 kecamatan itu, dan 1 kecamatan lagi, terjadi kontrak. Kami menemukan bukti-bukti kontrak politik antara Calon Bupati Nomor 3 dengan para ketua RT yang terbanyak itu di 3 kecamatan yang bersangkutan, Yang Mulia.

997. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:00:40]

Ya. Jadi yang ingin saya tegaskan sekali lagi, kecuali yang paling atas, maka kalau terjadi ... apa ... PSU ya, ini diikuti oleh seluruh pasangan calon.

998. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [02:00:53]

Benar, Yang Mulia.

999. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:00:54]

Kecuali yang paling atas itu, ya?

1000. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [02:00:55]

Ya, kecuali yang sampai dengan poin ... maaf.

1001. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:00:59]

Ya. Poin berapa ini?

1002. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [02:01:00]

Sampai dengan 5.

1003. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:01:01]

5, ya?

1004. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [02:01:02]

Ya.

1005. KETUA: SALDI ISRA [02:01:03]

Oke, ya. Terima kasih, Pak Heru.

1006. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [02:01:05]

Sama-sama, Yang Mulia. Terima kasih.

1007. KETUA: SALDI ISRA [02:01:07]

Cukup. Ini selesai, ya. Giliran Pemohon selesai.

Nah, nanti akan ada giliran Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu. Semua yang ada dalam ruangan itu disebut semua oleh Pemohon tadi. Jadi, tugas Termohon, tugas Pihak Terkait, dan Bawaslu untuk menjelaskannya. Itu Pak ... apa ... sudah mulai agak mengantuk itu, sebentar lagi jadwal Salat Jumat, Pak Wakil Kamal.

Nanti kalau sampai salat jumat, kita tinggal lurus ke sana, langsung ketemu masjid di situ. Jangan lupa berinfak.

Sebelum ditutup, kita sahkan bukti dulu, ya. Sebelum nanti kalau ada pertanyaan satu, dua, kita akan layani, tapi kita selesaikan dulu yang menjadi hak dari Pemohon.

Perkara Nomor 08 Kota Lhokseumawe menyampaikan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-47, kemudian tambahan Bukti P-48 sampai dengan P-61, betul?

1008. PEMBICARA: [02:02:08]

Betul, Yang Mulia.

1009. KETUA: SALDI ISRA [02:02:08]

Betul. Sudah diverifikasi dan dinyatakan lengkap.

KETUK PALU 1X

Nah, ini soal keterangan lain.

KTA atas nama Regginaldo Sultan, Ucok Edison, Pangeran, Ferdian Sutanto, dan lain-lain, itu sudah expired 31 Desember. Tolong KTA yang baru nanti disampaikan, ya.

KTA atas nama Ridwan Syaidi Tarigan berlaku sampai 18 Oktober 2024, itu lebih lama lagi expired-nya.

KTA atas nama Rahmat Taufit, Bayu Aditya Putra, Wulan Sari, Annisa Diva Picaesa, Girsang, itu tidak ada KTA-nya. Nanti kalau tidak ada, tidak diperbarui, kita coret saja semua, supaya pasti.

Kemudian Erwinsyah, Hanna Maria Manurung, Ridwan Suherman, masa berlaku KTA-nya tidak jelas. Ini jadi modus juga nih, dihapus masa berlakunya, supaya tidak bisa dilacak.

Pihak Terkait atas nama Bayhakki[sic!], tidak ada KTA. Pihak Terkait, ya? Dilengkapi. Nanti kalau sidang berikutnya enggak ada, enggak boleh masuk ruang sidang atau tidak diperbarui.

Perkara 52 Halmahera Selatan, Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-133, tambahan bukti serat ... P-134 sampai dengan P-159, betul? Betul? Betul. Lengkap, diketukkan palu. Sah.

KETUK PALU 1X

Untuk Pemohon, KTA atas nama Mulya Sumarmo[sic!] ... sumar ... Sarmono, Muh. Salman Darwis, dan Lajamra Hi Zakaria, sampai 31 Desember juga. Pak Salman, diperbarui, ya?

Nah, ini KTA atas nama Nasrullah lebih parah lagi, berlaku sampai 31 Desember 2021, belum diperpanjang sama sekali. Ini mau jadi anggota tapi enggak mau bayar iuran anggota, bagaimana para lawyer ini?

Pihak Terkait, KTA atas nama Iqbal Tawakal Pasaribu dan Hedi Hudaya berlaku 31 Desember, kemudian Iwan Gunawan tidak ada KTA

dan tidak ada bukti acara sumpah. Tolong dilengkapi sebelum datang gilirannya, nanti akan kita cek lagi.

Halmahera Selatan Nomor 58. P-1 sampai dengan P-84, betul?

1010. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [02:04:50]

Ya, Yang Mulia. Mohon izin, yang pada saat kita Perbaiki Permohonan, di situ ada P-14 yang belum kita masukkan.

1011. KETUA: SALDI ISRA [02:04:58]

Oke.

1012. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [02:05:01]

Padahal sudah dimaterai, cuma pada saat leges di ... ada yang tercecer.

1013. KETUA: SALDI ISRA [02:05:08]

Tertinggal, tercecer. Oke, nanti dimasukkan, ya.

1014. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [02:05:10]

Ya, dan ada penambahan bukti juga.

1015. KETUA: SALDI ISRA [02:05:13]

Tunggu dulu, yang ini dulu. Oke, ya. Yang ini disahkan dulu, ya.

1016. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [02:05:15]

Ya, siap, Yang Mulia.

1017. KETUA: SALDI ISRA [02:05:15]

Yang tidak ada masalah.

KETUK PALU 1X

Penambahan bukti nanti Anda sampaikan, akan diverifikasi.

1018. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIDI NOLDI KURAMA [02:05:21]

Siap, Yang Mulia.

1019. KETUA: SALDI ISRA [02:05:22]

Oke.

Ini KTA atas nama Bambang Joisangadji[sic!], Sarwin Hi Hakim, Mohamad Ansyarianto berlaku sampai 31 Desember, diperbarui.

Pihak terkait, KTA atas nama Iqbal Tawakal Pasaribu, Hedi Udaya, sama dengan tadi, Iwan Gunawan tidak ada KTA.

Pak ... apa ya ... di sini Pak Wakil Kamal, tolong dicatat itu anggotanya.

Palopo, itu mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-51. Betul, ya. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Terakhir, Mahakam Ulu P-1 sampai dengan P-47.

1020. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [02:06:12]

Benar, Yang Mulia.

1021. KETUA: SALDI ISRA [02:06:13]

Nah, ada catatan. Pertama, P-5, scan surat tidak terbaca dengan jelas.

1022. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [02:06:19]

Baik, kami lengkapi, kami ganti nanti.

1023. KETUA: SALDI ISRA [02:06:22]

P-13 sebagian teks terpotong pada scan.

1024. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [02:06:25]

Baik.

1025. KETUA: SALDI ISRA [02:06:25]

P-13. P-43 sampai dengan P-47 hanya menyerahkan satu rangkap bukti legesnya.

1026. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [02:06:34]

Ya, kami (...)

1027. KETUA: SALDI ISRA [02:06:35]

Nanti dilengkapi (...)

1028. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [02:06:33]

Ya, kami yang satu rangkap masih di meja kami, Yang Mulia.

1029. KETUA: SALDI ISRA [02:06:38]

Ya, nanti diserahkan.

1030. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [02:06:39]

Baik, Yang Mulia.

1031. KETUA: SALDI ISRA [02:06:39]

Jadi keterangan ini benar, ya?

1032. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [02:06:41]

Benar, Yang Mulia.

1033. KETUA: SALDI ISRA [02:06:41]

Kita sahkan sepanjang yang tidak bermasalah.

KETUK PALU 1X

Selesai. Ada yang mau bertanya? Mau angkat tangan?

1034. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:06:49]

Izin, 52, 58, Yang Mulia.

1035. KETUA: SALDI ISRA [02:06:51]

Oke. Silakan 52, 58.

1036. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:06:54]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

1037. KETUA: SALDI ISRA [02:06:55]

Ini 52-58, Halmahera, ya?

1038. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:06:58]

Halmahera Selatan, Yang Mulia.

1039. KETUA: SALDI ISRA [02:06:58]

Ya.

1040. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:06:59]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Kuasa Termohon untuk Perkara 52 dan 58 hanya mohon izin untuk inzage bukti, Yang Mulia.

1041. KETUA: SALDI ISRA [02:07:06]

Oke. Itu yang mau saya umumkan.

1042. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:07:09]

Terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia.

1043. KETUA: SALDI ISRA [02:07:10]

Ini ada pengumuman terakhir itu.

1044. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:07:12]

Baik.

1045. KETUA: SALDI ISRA [02:07:12]

Soal inzage diperbolehkan sepanjang jam kerja di Gedung 1 dan harus mengajukan surat ... apa namanya ... permohonan untuk inzage.

1046. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:07:23]

Mengajukan suratnya, Yang Mulia?

1047. KETUA: SALDI ISRA [02:07:24]

Ya, nanti diajukan setelah ini. Diajukan ke Kepanitraan. Yang lain?

1048. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN HADI [02:07:29]

Izin, Yang Mulia.

1049. KETUA: SALDI ISRA [02:07:30]

Ya, silakan. Dari?

1050. KUASA HUKUM TERMOHON 08: RIDWAN HADI [02:07:30]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Dari Lhokseumawe.

1051. KETUA: SALDI ISRA [02:07:33]

Lhokseumawe.

1052. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN HADI [02:07:35]

Izin jika diperkenankan, kami ingin ... apa ... ada beberapa yang harus diungkapkan fakta, Yang Mulia.

1053. KETUA: SALDI ISRA [02:07:41]

Ya, tapi jangan sekarang, Pak, nanti ada gilirannya.

1054. KUASA HUKUM TERMOHON 08: RIDWAN HADI [02:07:44]

Ya, ingin bertanya seharusnya melalui Majelis Hakim kepada Bawaslu Republik Indonesia. Kebetulan hadir, Yang Mulia.

1055. KETUA: SALDI ISRA [02:07:50]

Ya. Nanti, Pak, gilirannya ada. Bukan sekarang.

1056. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN HADI [02:07:52]

Oh, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

1057. KETUA: SALDI ISRA [02:07:54]

Ini sudah dibagi-bagi gilirannya.

1058. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN HADI [02:07:54]

Ya.

1059. KETUA: SALDI ISRA [02:07:55]

Nanti kalau Bapak mau bertanya ada gilirannya, ya. Kalau mau mengungkap, ungkap apa yang mau diungkap di jawaban Termohon nanti, ya?

1060. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN HADI [02:08:04]

Terima kasih, Yang Mulia.

1061. KETUA: SALDI ISRA [02:08:06]

Oke. Yang tidak boleh diungkap itu satu saja, Pak. Nah, itu. Tahu dia. Berapa besar honorinya enggak boleh diungkap. Ada lagi yang lain? Cukup?

1062. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [02:08:18]

Izin, Yang Mulia.

1063. KETUA: SALDI ISRA [02:08:18]

Dari?

1064. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [02:08:21]

217, Yang Mulia.

1065. KETUA: SALDI ISRA [02:08:23]

Apa lagi ini?

1066. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [02:08:24]

Izin, Yang Mulia. Kami ada penambahan kuasa. Jika diperkenankan, kami nanti lampirkan juga sekalian penambahan kuasa, Yang Mulia.

1067. KETUA: SALDI ISRA [02:08:31]

Boleh, tapi kan nanti berbagi juga honorinya jadinya, tambah kecil honorinya.

1068. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [02:08:35]

Kami tidak ada honor, Yang Mulia.

1069. KETUA: SALDI ISRA [02:08:36]

Boleh, enggak apa-apa. Kalau enggak ada honor, nanti ada honor dari Yang Maha Kuasa.

1070. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [02:08:42]

Amin, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

1071. KETUA: SALDI ISRA [02:08:44]

Ada lagi yang lain? Cukup? Ya, ini dari mana? Palopo, silakan.

1072. KUASA HUKUM TERMOHON: SUBHAN [02:08:54]

Menyangkut mengenai masalah teknis persidangan, Yang Mulia.

1073. KETUA: SALDI ISRA [02:08:57]

Ya.

1074. KUASA HUKUM TERMOHON: SUBHAN [02:08:57]

Karena yang bisa mewakili masuk dalam ruang sidang itu kan maksimal dua orang.

1075. KETUA: SALDI ISRA [02:09:03]

Ya.

1076. KUASA HUKUM TERMOHON: SUBHAN [02:09:04]

Sementara di dalam kuasa dan kemudian KPU itu memiliki komisioner 5 orang.

1077. KETUA: SALDI ISRA [02:09:10]

Ya.

1078. KUASA HUKUM TERMOHON: SUBHAN [02:09:10]

Kami punya tim hukum lebih dari satu. Pertanyaannya, Yang Mulia, apakah boleh bergiliran?

1079. KETUA: SALDI ISRA [02:09:20]

Boleh, Pak.

1080. KUASA HUKUM TERMOHON: SUBHAN [02:09:21]

Boleh, siap.

1081. KETUA: SALDI ISRA [02:09:22]

Ya, bergiliran maksudnya kalau sidang ini datang dua, sidang berikutnya dua, yang lain boleh. Tapi enggak di jam yang sama, itu bergiliran, Pak. Nanti (ucapan tidak terdengar jelas) caranya itu.

1082. KUASA HUKUM TERMOHON: SUBHAN [02:09:31]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

1083. KETUA: SALDI ISRA [02:09:33]

Oke, paham, ya?

1084. KUASA HUKUM TERMOHON: SUBHAN [02:09:34]

Paham.

1085. KETUA: SALDI ISRA [02:09:34]

Oke, terima kasih.

1086. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [02:09:35]

Izin, Yang Mulia. Terakhir, Yang Mulia.

Terkait dengan dokumen fisik, kami belum diserahkan. Kemarin kami sudah bagian konsultasi dan informasi. Kemudian diarahkan untuk disampaikan di muka persidangan. Kami mohon untuk diterima, Yang Mulia.

1087. KETUA: SALDI ISRA [02:09:47]

Ya, nanti akan diambil, ya. Biar diverifikasi.

1088. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUNG RAMADHAN SAPUTRA [02:09:49]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

1089. KETUA: SALDI ISRA [02:09:50]

Oke, yang diserahkan sekarang nanti hasil verifikasinya di sidang berikutnya. Sidang berikutnya itu kalau bisa jangan terlalu molor menyerahkan bukti-bukti, supaya kami ada waktu untuk memverifikasi dan kalau bisa diverifikasi akan disahkan dalam persidangan. Tapi kalau sidang mau selesai diserahkan banyak-banyak, ya enggak bisa disahkan ketika itu. Bisa paham semua?

Terima kasih atas sikap baik dan ramah semua dan sehingga sidang kita bisa berjalan dengan baik, dan sampai jumpa di sidang berikutnya.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda Mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan Pemohon untuk Perkara 08, 52, 58, 217, 168, 224 PPHU Wali Kota dan Bupati Tahun 2024 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.12 WIB

Jakarta, 10 Januari 2025
Plt.Panitera,
Wiryanto

